

**SERI II**

# **PENYULUHAN PERTANIAN**

## **PERENCANAAN PENYULUHAN**

**PENULIS :**

**Dr. Sabir, S.Pt., M.Si.**

**M. Issac Maulana, S.T., M.Si.**

**Wulansari Apriani, S.Pd., M.Pd.**

**Jamaluddin Al Afgani, M.P.**

## **Ketentuan Hukum Pidana Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**SERI II**

---

**PENYULUHAN  
PERTANIAN  
PERENCANAAN PENYULUHAN**

**Dr. Sabir, S.Pt., M.Si.**

**M. Issac Maulana, S.T., M.Si.**

**Wulansari Apriani, S.Pd., M.Pd.**

**Jamaluddin Al Afgani, M.P.**



**SERI II**

---

# **PENYULUHAN PERTANIAN**

## **PERENCANAAN PENYULUHAN**

**Dr. Sabir, S.Pt., M.Si. dkk**

**Copyright © Dandelion Publisher**

Cetakan Pertama: Desember 2020

Editor: Dini W. Tamam

Tata Letak Sampul dan Isi: Tim Redaksi

Ilustrator: Tim Redaksi

ISBN: 978-623-6696-95-8

xii + 108 halaman; 15 x 22 cm



Diterbitkan Oleh:

**CV. Dandelion Publisher**

**Anggota IKAPI No. 350/JBA/2020**

Taman Kenari Jagorawi

Citeureup, Bogor, Jawa Barat

0812 6111 765

[dandelionpublisher@gmail.com](mailto:dandelionpublisher@gmail.com)

[www.dandelionpublisher.com](http://www.dandelionpublisher.com)

# **SAMBUTAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPPSDMP)**

Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta jiwa rakyat Indonesia, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan daya saing, serta ekspor komoditas unggulan pertanian. Keberhasilan arah kebijakan tersebut tentu tidak lepas dari peran para Penyuluh Pertanian. Keberadaan Penyuluh Pertanian sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian, terutama peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian secara simultan melakukan upaya pemberdayaan kepada para penyuluh agar tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

Dinamika perubahan global dewasa ini berdampak pada tuntutan akan profesi di bidang penyuluhan pertanian yang juga semakin tinggi. Suka atau tidak suka, Penyuluh Pertanian harus mengikuti dinamika perubahan tersebut dengan senantiasa meningkatkan kapasitasnya. Jika tidak, tentu akan "tergilas" oleh perubahan tersebut. Peningkatan kapasitas tidak hanya diperoleh melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pelatihan, kursus, seminar, tetapi juga dapat dilakukan secara mandiri yaitu dengan cara banyak membaca. Salah satu buku yang bisa digunakan sebagai referensi oleh Penyuluh Pertanian yaitu buku *Penyuluhan Pertanian Seri 2 – Perencanaan Penyuluhan* yang membahas tentang Identifikasi Potensi Wilayah, Program Penyuluhan Pertanian, dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian.

Buku ini terbit atas ide atau gagasan kolaborasi antara Widyaaiswara dan Staf Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Penulis. Saya berharap buku seri penyuluhan ini bukan karya terakhir tetapi terus diikuti karya buku lainnya yang bisa menjadi inspirasi dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas Penyuluh, sehingga keberadaan dan peran Penyuluh dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.

Jakarta, September 2020

**Kepala BPPSDMP**



**Prof. Dr, Ir, Dedi Nursyamsi. M.Agr.**

# SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga rekan-rekan peserta *Bimbingan Teknis Menulis Buku Ilmiah Populer* yang diselenggarakan oleh Ikatan Widyaiswara Indonesia Cabang Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Dandelion Publisher dapat menyelesaikan naskahnya dan diterbitkan oleh penerbit profesional yang berbadan hukum.

Menulis memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Menulis memiliki banyak manfaat diantaranya adalah menciptakan jembatan berkomunikasi dengan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu Kebiasaan menulis akan mengasah dan mempertajam kemampuan diri sendiri dalam berbahasa tulis.

Manfaat lain dari menulis adalah akan membantu orang lain dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang sama dengan yang dihadapi si penulis. Menulis dapat mengasah daya nalar dan daya ingat seseorang, melatih ketajaman untuk berkonsentrasi. Selain itu, aktivitas menulis dapat memperbanyak teman dan sahabat, serta menjadi sarana aktualisasi diri seseorang.

Menuangkan ide melalui tulisan, akan membuat ide tersebut lebih mudah diketahui masyarakat. Dengan demikian ide tersebut tidak hanya diketahui diri sendiri, tetapi juga diketahui oleh banyak orang. Tentunya, tanggapan setiap pembaca terhadap ide tulisan kita beragam. Ada yang sepakat, ada pula yang menolak. Tapi itu bukan suatu persoalan, yang terpenting ide kita bisa diketahui banyak orang.

Berdiskusi melalui media tulisan merupakan cara yang menarik. Karena tidak semua orang mampu melakukan cara seperti ini. Pada umumnya orang berdiskusi dengan cara lisan. Ketika kita menulis, secara tak langsung kita telah melakukan diskusi dengan suatu persoalan yang kita tulis. Hal yang

membanggakan, ketika tulisan ditanggapi secara kritis oleh penulis lain. Apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kita, atau mungkin menambahkan gagasan kita yang belum sempurna, secara otomatis juga akan menambah wawasan kita.

Bagi rekan-rekan pejabat fungsional seperti Widyaiswara, Guru, Dosen, Peneliti, Penyuluh, ataupun pejabat fungsional lainnya, menulis merupakan salah satu bagian dari pengembangan profesi yang menjadi salah satu syarat penentu dalam kenaikan pangkat ataupun jabatan fungsional. Selain itu, memiliki kemampuan menulis menjadi sebuah prestise dan prestasi, mendatangkan kepuasan batin, menambah pengetahuan, wawasan, serta bisa dijadikan sebagai salah satu sumber tambahan penghasilan keluarga. Dan manfaat terbesar dari menulis adalah, apabila tulisan kita menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan, maka *insyaaAllah* pahalanya akan terus mengalir, bahkan hingga kita sudah meninggalkan dunia ini, manfaatnya akan terus kita rasakan.

Selamat berkarya para sahabat semua! Semoga karya tulis bapak dan ibu menjadi inspirasi kebaikan bagi para pembaca.  
*Aamiin*

Makassar, September 2020

**Ketua III**

**Dewan Pimpinan Pusat**

**Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia  
(DPP APWI)**

**Jamaluddin Al Afgani, MP**

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA BPPSDMP .....</b>	<b>v</b>
<b>SEKAPUR SIRIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>

## **BAB I**

### **IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH DAN**

<b>AGROEKOSISTEM .....</b>	<b>1</b>
<b>A. PENGERTIAN POTENSI WILAYAH DAN AGROEKOSISTEM ...</b>	<b>1</b>
<b>B. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Identifikasi Data Primer .....</b>	<b>2</b>
(1) Wawancara Semi Terstruktur .....	2
(2) Teknik Pembuatan Peta Sumber Daya .....	5
(3) Teknik Penelusuran Lokasi/Transek .....	10
(4) Teknik Pembuatan Bagan Kecenderungan dan Perubahan .....	14
(5) Pembuatan Sketsa Kebun .....	17
(6) Teknik Pembuatan Bagan Peringkat .....	19
(7) Pembuatan Bagan Hubungan Kelembagaan/ Diagram Venn .....	21
(8) Penyusunan Kalender Musim .....	23
(9) Kajian Mata Pencaharian .....	27
<b>2. Identifikasi Data Sekunder .....</b>	<b>29</b>
<b>C. ANALISIS DAN PERUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>31</b>

## **BAB II**

<b>PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. LATAR BELAKANG PROGRAMA PENYULUHAN     PERTANIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>B. PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP PROGRAMA     PENYULUHAN PERTANIAN .....</b>	<b>42</b>

- C. PENGORGANISASIAN.....48
  - 1. Struktur dan Susunan Keanggotaan .....48
  - 2. Tugas Tim Penyusun Programa .....50
- D. PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN .....51
  - 1. Unsur-Unsur Programa Penyuluhan .....51
  - 2. Proses.....53
  - 3. Tahapan.....63
- E. REVISI PROGRAM .....85
- F. FORMAT PELAPORAN PROGRAM PENYULUHAN  
PERTANIAN.....86

**BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH**

- PERTANIAN** .....89
- A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP RENCANA KERJA  
TAHUNAN PENYULUH (RKTP).....89
- B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN  
PENYULUH (RKTP).....94
- C. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH  
(RKTP) .....96
  - 1. Unsur-unsur dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh  
Pertanian (RKTP) .....96
  - 2. Pembiayaan.....97
  - 3. Contoh Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian.....97

- DAFTAR PUSTAKA** .....101

- PROFIL PENULIS** .....103

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Sumber Daya .....	9
Gambar 2	Bagan Transek.....	13
Gambar 3	Bagan Hubungan Kelembagaan/Diagram Venn .	23
Gambar 4	Kalender Musiman .....	26
Gambar 5	Tahapan Penyusunan Prgrama Nasional.....	55
Gambar 6	Proses Penyusunan Programa Provinsi .....	57
Gambar 7	Proses Penyusunan Programa Kabupaten .....	59
Gambar 8	Proses Penyusunan Programa Kecamatan.....	61
Gambar 9	Proses Penyusunan Programa Desa/Kelurahan ...	63
Gambar 10	Tahapan penyusunan Programa.....	63

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Potensi Desa .....	32
Tabel 2 Rekapitulasi Masalah di Tingkat Desa .....	33
Tabel 3 Peringkat Masalah dan Faktor Penyebab Masalah di Tingkat Desa .....	34
Tabel 4 Analisis Hasil PRA di Tingkat Desa.....	35
Contoh Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian.....	84
Contoh Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.....	98
Contoh Jadwal Rencana Kerja Bulanan Penyuluh Pertanian .....	99
Contoh Jadwal Rencana Kerja Harian Penyuluh Pertanian .....	100

# **BAB I**

## **IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH DAN AGROEKOSISTEM**

### **A. PENGERTIAN POTENSI WILAYAH DAN AGROEKOSISTEM**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi memiliki arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Sedangkan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa). Misalnya, kita sedang membahas tentang potensi wilayah desa, maka "potensi desa mengandung arti kemampuan yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk dikembangkan".

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agroekosistem adalah pertanian yang bersifat hubungan timbal balik antara sekelompok manusia (masyarakat) dan lingkungan fisik dari lingkungan hidupnya guna memungkinkan kelangsungan hidup kelompok manusia (masyarakat) itu.

Kemampuan yang dimiliki suatu lingkungan tertentu, misalnya desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya menjadi "potensi" bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu "realita" berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu, potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat bagi masyarakat.

Penyuluh yang bergerak di sektor pertanian harus mampu menggali potensi agroekosistem wilayah pertanian tertentu, dan membuatnya menjadi suatu "kenyataan" yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan pertanian khususnya di bidang agribisnis. Bermanfaat dapat berarti meningkatkan produktivitas, pendapatan, nilai tambah, atau secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dan terkait dengan sektor pertanian.

Penyuluh harus mengasah kemampuannya agar mampu melihat dan menggali potensi agroekosistem wilayah dimana ia bekerja. Ia bersama-sama dengan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha berkolaborasi mengubahnya menjadi pertanian yang lebih bermanfaat.

Untuk mencapai hasil yang baik, seorang penyuluh perlu mempersiapkan suatu "instrumen" untuk menggali potensi wilayah agroekosistem, sehingga fenomena agroekosistem menjadi mudah dipahami dan akan memudahkan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan usaha tani tertentu.

Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem dilakukan untuk memperoleh data keadaan wilayah dan agroekosistem berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh di lapangan, baik dari petani maupun masyarakat yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari monografi desa/kecamatan/BPP dan atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem adalah:

1. Identifikasi data primer menggunakan pendekatan partisipatif atau PRA (*Participatory Rural Appraisal*).
2. Identifikasi data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data potensi wilayah dan agroekosistem dari data monografi desa/kecamatan/ BPP dan sumber lain yang mendukung.
3. Penetapan *impact point* dengan menggunakan analisis masalah dan penyebab masalah, penetapan prioritas dan menetapkan faktor penentu.

## **B. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

### **1. Identifikasi Data Primer**

#### **(1) Wawancara Semi Terstruktur**

Teknik wawancara keluarga petani adalah teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang dipergunakan untuk

mengkaji sejumlah topik informasi mengenai aspek-aspek kehidupan keluarga petani, yang disusun di dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini sifatnya semi terbuka, karena hanya merupakan bahan acuan wawancara yang dapat diubah dan disesuaikan dengan proses diskusi untuk mencapai tujuan kajian. Wawancara semi terstruktur ini memiliki beberapa jenis, yaitu:

1) Wawancara Individu

- a. *Wawancara informan kunci*, dilakukan jika dibutuhkan kajian dengan sumber informasi yang dianggap dimiliki oleh sumber informasi khusus. Informan kunci adalah orang yang dianggap berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai sesuatu. Informan kunci tersebut misalnya orang luar yang sudah lama tinggal, seperti guru, dokter, pendatang lain, dan sebagainya, sesepuh/ tetua, pejabat desa atau mereka yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat, atau masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan/ organisasi.
- b. *Wawancara perorangan pilihan* yaitu orang tertentu yang dapat dianggap mewakili kelompok masyarakat tertentu, misal: petani, buruh, tuan tanah, petani pembaharu dan sebagainya. Hasilnya disebut *profil perorangan*.

2) Wawancara Keluarga/Rumah Tangga Petani

- a. *Wawancara keluarga petani* dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan keluarga petani, hasilnya disebut *profil keluarga petani*.
- b. Yang disebut *keluarga* adalah keluarga inti (Ayah, Ibu, Anak) atau keluarga besar. Rumah Tangga adalah unit pengelolaan perekonomian didalam keluarga.

3) Wawancara Kelompok (Petani)

Wawancara dilakukan untuk membahas sejumlah topik informasi yang telah ditetapkan di dalam pedoman wawancara, tetapi dibahas dan didiskusikan dalam kelompok.

Hal yang didiskusikan tergantung dari kebutuhan informasi, biasanya untuk mengecek (*triangulási*).

Di dalam rangka wawancara semi terstruktur ini, ada langkah-langkah penerapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

1) Persiapan

- a. Menyusun pedoman wawancara (pedoman disusun sesuai topik kajian). Perlu diingat untuk daftar topik-topik pertanyaan hanya sebagai bahan acuan.
- b. Memilih keluarga/rumah tangga yang akan di wawancara. Harus diingat bahwa keluarga yang dipilih adalah keluarga yang dapat mewakili berbagai keadaan di masyarakat, misal berbagai tingkat ekonomi.
- c. Keluarga yang lengkap dan yang tidak lengkap.

2) Pelaksanaan Wawancara

- a. Menyepakati dan mengatur waktu dengan keluarga yang akan di wawancara.
- b. Pewawancara menjelaskan maksud kegiatan secara sederhana tetapi jelas.
- c. Amati keadaan sekitar untuk membantu mengetahui taraf kesejahteraannya.
- d. Lakukan obrolan pendahuluan, biasanya tentang kebunnya.
- e. Lanjutkan wawancara dari satu topik ke topik lain dengan menggunakan pedoman wawancara.
- f. Jawaban petani bisa dijadikan bahan untuk mengembangkan topik obrolan.
- g. Gunakan pertanyaan yang dapat memancing pendapat mereka tentang berbagai hal.
- h. Buat catatan proses dan hasil wawancara secara cermat.
- i. Cantumkan nama responden, pewawancara, tempat, dan tanggal wawancara.

## **(2) Teknik Pembuatan Peta Sumber Daya**

Pemetaan adalah teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai keadaan wilayah desa beserta lingkungannya. Keadaan-keadaan itu digambarkan ke dalam peta atau sketsa desa. Ada peta yang menggambarkan keadaan sumber daya umum desa, dan ada peta dengan tema tertentu yang menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan ruang lingkup tema tersebut (misalnya peta desa yang menggambarkan jenis-jenis tanah, peta sumber daya pertanian, peta penyebaran penduduk, peta pola pemukiman, dan sebagainya). Ada beberapa cara pemetaan, yaitu:

### 1) Pemetaan di atas tanah.

- a. Pemetaan di atas tanah dapat dilakukan di halaman dengan peralatan sederhana, misal kayu untuk menggaris, biji-bijian, batu-batuan, dan sebagainya. Bisa juga bahan-bahan lain yang tersedia untuk menandai bagian-bagian penting.
- b. Cara ini memiliki keunggulan yaitu dapat dilakukan oleh banyak orang secara mudah. Kesalahan informasi mudah diperbaiki dan informasi dapat digambarkan lebih jelas dan mendetail. Cara ini disukai karena menimbulkan kegembiraan dan suasana santai.

### 2) Pemetaan di atas kertas.

- a. Pemetaan dilakukan di atas kertas dengan menggunakan alat tulis. Mula-mula dilakukan penandaan dengan simbol-simbol dengan menggunakan spidol bermacam warna agar menarik dan mudah dikenal. Arti simbol-simbol informasi yang dicantumkan di atas peta diberi keterangan di sudut kertas.
- b. Pemetaan dapat ditinggalkan di desa sebagai dokumentasi, tetapi gambar dengan kertas memiliki kelemahan luas kertas yang terbatas sehingga menyulitkan dalam menggambar dan partisipasi masyarakat tidak sebesar pemetaan di atas tanah.

- 3) Pembuatan model atau maket.
  - a. Pemetaan dapat pula dibuat dengan model atau maket dalam 3 dimensi. Model merupakan pengembangan dari pemetaan di atas tanah, yang berbeda adalah bahwa dalam kegiatan ini simbol-simbol dibuat dalam bentuk menyerupai sesungguhnya.
  - b. Keuntungan cara ini adalah model lebih menarik dari segi penampilan, menimbulkan partisipasi peserta yang lebih baik karena lebih menyenangkan. Sedangkan kekurangan model ini adalah membutuhkan persiapan yang lebih lama dan keterampilan yang lebih khusus.

Di dalam teknik pembuatan peta sumber daya, secara garis besar terdapat beberapa jenis informasi yang biasa dikaji dengan pemetaan, yaitu:

- 1) Peta sumber daya desa

Peta dibuat untuk melihat keadaan umum desa dan lingkungannya yang menyangkut sumber daya dan sarana prasarana, keadaan fisik lingkungan desa, luas dan letak lahan-lahan, penyebaran daerah pemukiman, daerah berhutan, lahan-lahan kritis, mata air, sungai atau aliran air, pasar, jalan raya, dan sebagainya.

- 2) Peta sumber daya alam desa

Peta ini untuk mengenal dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumber daya alam serta permasalahan-permasalahannya, terutama sumber daya pertanian. Yang diperhatikan dalam hal ini adalah kebun, sawah, hutan, sumber air pertanian, dan lain-lain.

- 3) Peta khusus

Peta dibuat untuk menggali aspek tertentu dalam sebuah wilayah seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, ekonomi, keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan (misalnya peta khusus penyebaran penduduk berdasarkan kelas-kelas sosial, pemetaan penyebaran hama tikus, peta penyebaran

kebun dan lahan pertanian, dan sebagainya). Yang dikaji adalah berbagai sumber daya yang ada, berbagai masalah, serta harapan-harapan masyarakat.

Tujuan Kajian Pemetaan Desa:

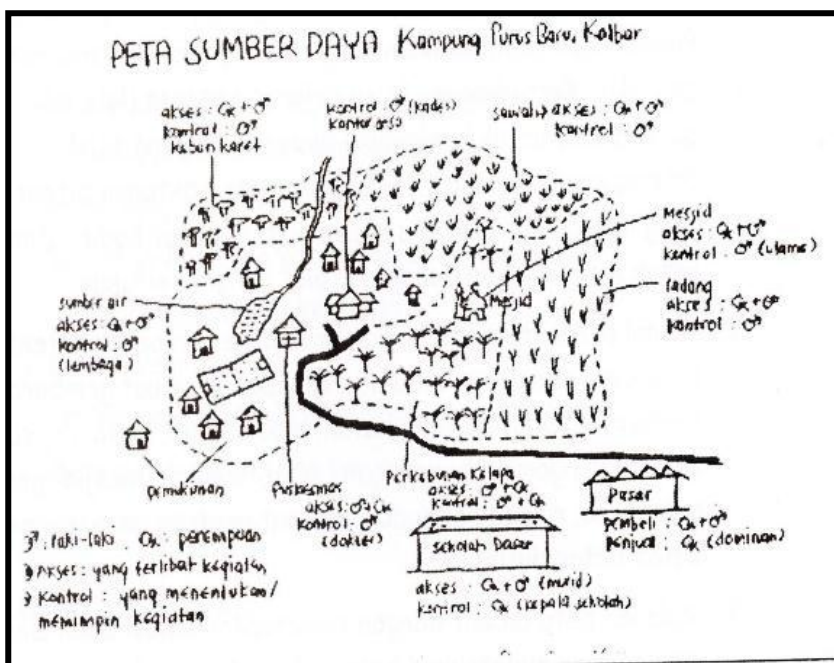
- 1) Untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan desa dan lingkungannya sendiri seperti: lokasi sumber daya dan batas-batas wilayah, keadaan jenis-jenis sumber daya, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi.
- 2) Untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengkaji perubahan-perubahan keadaan dari sumber daya, mengenal sebab-sebab dan akibat dari perubahan tersebut.

Langkah-langkah penerapan:

- 1) Terangkan maksud dan proses pemetaan.
- 2) Diskusikan jenis-jenis sumberdaya yang ada di desa dan lokasi sumberdaya tersebut.
- 3) Sepakati bersama peserta;
  - a. Jenis sumberdaya penting yang akan dicantumkan kedalam peta serta perlu didiskusikan lebih lanjut
  - b. Simbol setiap jenis sumberdaya yang akan dicantumkan dalam peta
- 4) Mintalah masyarakat untuk membuat peta di atas tanah atau di atas kertas dengan cara sebagai berikut:
  - a. Dimulai dari titik awal yang diinginkan masyarakat, seperti rumah ibadah, kantor desa dan sebagainya
  - b. Kemudian lengkapi secara detil keadaan yang lain seperti jalan, sungai, batas dusun, dan sebagainya.
  - c. Lengkapi peta dengan gambar detil dengan hal-hal khusus seperti lahan kritis, hutan dan sebagainya.
  - d. Pastikan bahwa dalam gambar tidak ada yang terlewat
- 5) Cantumkan di sudut peta, simbol-simbol beserta artinya.
- 6) Setelah peta selesai, diskusikan lebih lanjut:

- a. Bagaimana keadaan sumber daya, apa masalah-masalah yang terjadi dengan sumber daya tersebut
- b. Apa akibat dari perubahan-perubahan dan masalah-masalah tersebut dengan kehidupan masyarakat.
- c. Apakah terdapat hubungan sebab akibat di antara perubahan tersebut.
- d. Catatlah seluruh masalah, potensi, dan informasi yang muncul dalam diskusi dengan cermat, sebab hasil penggalian ini akan menjadi bahan bagi kegiatan penerapan teknik lain (Tim PRA mencatat proses dan hasil diskusi).
- e. Dokumentasikan peta yang dihasilkan sebagai bahan acuan di kemudian hari.
- f. Cantumkan pada sudut peta, peserta, pemandu, tempat, tanggal diskusi.

Desa		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Tim	1.	Ketua
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota
	5.	Anggota
	6.	Anggota
	7.	Anggota
	8.	Anggota



Gambar 1 Peta Sumber Daya

### **(3) Teknik Penelusuran Lokasi/Transek**

Secara harfiah, transek adalah gambar irisan muka bumi. Pada awalnya transek digunakan oleh para ahli lingkungan untuk mengenali dan mengamati wilayah-wilayah ekologi sebagai teknik PRA. Teknik penelusuran lokasi (transek) adalah teknik PRA untuk melakukan pengamatan langsung lingkungan dan sumber daya masyarakat dengan jalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati. Hasil pengamatan dan lintasan tersebut kemudian dituangkan dalam bagan atau gambar irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut. Transek memiliki beberapa jenis, yaitu:

#### *1) Transek Sumber Daya Alam*

Transek ini dilakukan untuk mengenali dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumber daya alam serta permasalahan-permasalahannya, terutama sumber daya pertanian. Informasi yang biasanya muncul antara lain adalah:

- a. Bentuk dan keadaan permukaan alam (*topografi*) termasuk di dalamnya: jenis tanah dan kesuburannya, kemiringan lahan, daerah tangkapan air, sumber-sumber air, dan sebagainya.
- b. Pemanfaatan sumber daya tanah (tata guna lahan) yaitu wilayah pemukiman, sawah, ladang, hutan, bangunan, jalan, padang rumput, dan sebagainya.
- c. Pola usaha tani mencakup jenis tanaman penting dan kegunaannya (pangan, obat, ternak), produktivitas lahan dan hasilnya, dan sebagainya.
- d. Teknologi setempat dan cara pengelolaan sumber daya alam termasuk teknologi tradisional seperti penahan erosi dari batu, pagar hidup, sistem penutup tanah, pengelolaan air, dan lain-lain.
- e. Pemilikan sumber daya alam: perorangan, milik adat, umum, desa, milik pemerintah.

Kajian lebih lanjut adalah:

- a. Kajian mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya, baik oleh pemilik atau bukan pemilik.
- b. Kajian hal-hal lain yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya, seperti perilaku berladang, upacara panen, sistem berternak, dan sebagainya.

Selain transek sumber daya, dapat pula dilakukan transek umum atau transek khusus seperti transek untuk kondisi lingkungan kesehatan desa dan lain-lain.

## *2) Transek Berdasarkan Lintasan*

- a. Transek lintasan garis lurus, dilakukan dengan menelusuri jalan utama dan jalan di pemukiman, atau berjalan dari titik terendah ke titik tertinggi atau sebaliknya.
- b. Transek lintasan bukan garis lurus dimulai dari lokasi yang telah direncanakan, yaitu dari lokasi yang paling dekat menuju ke lokasi paling jauh, sehingga lintasan yang dilalui bisa zig-zag, berputar, atau menyapu.
- c. Transek lintasan saluran air, dilakukan dengan melintasi aliran air secara sistematis

Penelusuran lokasi transek dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat agar mendiskusikan keadaan sumber daya dengan cara mengamati langsung hal yang didiskusikan di lokasi. Hal-hal yang biasanya didiskusikan adalah: a) Masalah-masalah pemeliharaan sumber daya pertanian seperti menanggulangi erosi, kurangnya kesuburan tanah, hama penyakit tanaman/hewan, pembagian air, penggundulan hutan, dan sebagainya; b) Potensi-potensi yang ada; c) Pandangan dan harapan petani mengenai keadaan tersebut; d) Hal-hal lain sesuai jenis transek dan tujuannya.

Langkah-langkah penerapan penelusuran lokasi transek adalah:

1) Persiapan.

Mempersiapkan tim dan masyarakat yang akan ikut, alat tulis, dan lain-lain.

2) Pelaksanaan.

a. Membahas kembali maksud dan tujuan kegiatan penelusuran lokasi serta proses yang akan dilakukan.

b. Sepakati bersama lokasi-lokasi yang akan dikunjungi serta topik-topik kajian

c. Sepakati titik awal.

d. Lakukan perjalanan, amati keadaan, biarkan masyarakat menunjukkan hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas.

e. Diskusikan keadaan sumberdaya tersebut dan amati dengan seksama.

f. Buatlah catatan hasil diskusi di lokasi.

3) Setelah Perjalanan.

a. Buat bagan transek, jelaskan cara dan proses pembuatan transek.

b. Sepakati simbol-simbol yang akan digunakan untuk menggambar bagan transek, lalu catat simbol dan artinya di pojok kertas.

c. Mintalah masyarakat membuat bagan transek dengan bahan yang mudah dihapus, tim PRA mendampingi.

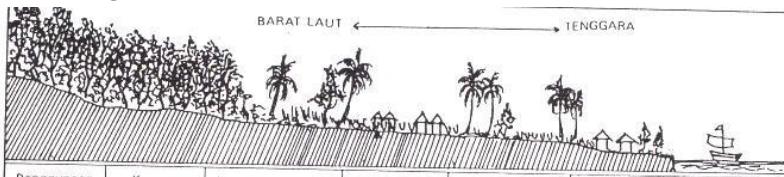
d. Diskusi dengan bahan bagan transek, apa permasalahan dan potensi yang ada, serta bagaimana harapan masyarakat.

e. Buat catatan hasil diskusi, cantumkan nama peserta dan pemandu serta tanggal terjadinya diskusi.

## Bagan Transek

Desa		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Tim	1.	Ketua
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota
	5.	Anggota
	6.	Anggota
	7.	Anggota
	8.	Anggota

### Contoh Bagan Transek



Gambar 2 Bagan Transek

Penggunaan Lahan	Kawasan Hutan	Hutan Terlantar Kebun, Sawah Tadah Hujan	Sawah Tadah Hujan dengan Pemukiman	Sawah Irigasi dan Kebun	Pemukiman	Laut
Ketinggian	> 140 dpl	100 dpl	50 dpl	20 dpl	10 dpl	0 dpl
Vegetasi	Hutan Campuran Kayu Rotan Padi Kapok	Semak belukar Alang-alang Bamboo Kelapa Jagung	- Padi - Kelapa - Kakao - Buah-buahan	- Padi - Kelapa - Cengkeh	Pemukiman	- Perahu - Ikan laut
Pemanfaatan	-	- Pangan/ Konsumsi - Pendapatan	- Pangan/ Konsumsi - Pendapata - Tempat tinggal	- Pangan/Konsumsi - Pendapatan	- Hutan bakau -Pemukiman	- Penangkapan ikan laut - Pangan - Pendapatan
Masalah	Pengambilan rotan	-Pemanfaatan lahan kurang produktif -Pegairan -Penyediaan semprotan -Produksi rendah	- Pengairan belum ada irigasi	- Tenaga kerja	- Modal Nelayan	- Alat dan prasarana penangkapan

#### **(4) Teknik Pembuatan Bagan Kecenderungan dan Perubahan**

Teknik pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan adalah teknik PRA yang dapat menggambarkan perubahan-perubahan berbagai keadaan, kejadian, serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Dari besarnya perubahan, hal-hal yang diamati dapat berarti berkurang, tetap, atau bertambah. Kita bisa memperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa yang akan datang.

Jenis informasi yang dikaji dalam teknik pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan adalah:

- 1) Perubahan dan perkembangan keadaan berbagai sumber daya seperti produktivitas lahan dan tingkat kesuburan tanah, curah hujan, ketersediaan air, ketersediaan kayu bakar dan kayu bangunan.
- 2) Perubahan dan perkembangan tataguna lahan (luas lahan untuk bersawah, berladang, pemukiman, hutan, luas rata-rata kepemilikan lahan, dan sebagainya).
- 3) Perubahan dan perkembangan penanaman pepohonan (jenis pohon, hasil, dan sebagainya).
- 4) Perubahan dan perkembangan penduduk (kelahiran, kematian dan perpindahan).

Kajian kecenderungan dan perubahan memiliki tujuan memfasilitasi masyarakat untuk: a) Mengenali berbagai perubahan terpenting yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupannya; b) Mengkaji berbagai hubungan diantara berbagai perubahan tersebut; c) Diskusi ini akan memberikan pemahaman tentang perubahan-perubahan dan cara pandang masyarakat tentang perubahan tersebut; d) Dapat memfasilitasi masyarakat dalam menilai dan menemukan cara-cara mengatasi dan mencegah perubahan yang buruk.

Langkah-langkah penerapan dalam teknik pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan adalah:

- 1) Terangkan maksud dan proses pelaksanaan kegiatan.

- 2) Mulailah diskusi dengan topik yang ringan, biasanya bagi petani masalah kebun menjadi perhatian utama. Apabila sebuah topik telah selesai dibahas, lanjutkan dengan topik berikutnya.
- 3) Ajak masyarakat untuk mendiskusikan: a) Perubahan-perubahan penting yang terjadi di desa; b) Apa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut
- 4) Setelah cukup tergambarkan, sepakati bersama peserta: a) Topik-topik utama (perubahan-perubahan yang penting) yang akan dicantumkan ke dalam bagan serta perlu didiskusikan lebih lanjut; b) Simbol topik-topik bahasan yang dicantumkan dalam bagan, berupa gambar-gambar sederhana yang mudah dikenali; c) Simbol untuk memberikan informasi bahan-bahan lokal yang tersedia seperti kerikil, biji jagung, dan sebagainya; d) Titik-titik atau selang waktu yang akan dicantumkan.
- 5) Mintalah masyarakat untuk membuat bagan di atas kertas besar yang ditempelkan di dinding beserta topik-topik informasi sesuai hasil diskusi.
- 6) Cantumkan pada sudut kertas simbol-simbol beserta artinya, serta penjelasan lain untuk memahami gambar.
- 7) Lakukan diskusi bagan perubahan lebih lanjut yaitu: a) Apa akibat dari perubahan-perubahan (yang sudah dan akan terjadi); b) Apakah ada hubungan sebab akibat di antara perubahan; c) Apakah perubahan itu akan berlanjut terus di waktu yang akan datang.
- 8) Catatlah seluruh masalah, potensi, informasi yang muncul dalam diskusi dengan cermat, sebab hasil penggalian ini akan menjadi bahan bagi kegiatan penerapan teknik lain (Tim PRA mencatat proses dan hasil diskusi).
- 9) Cantumkan nama-nama peserta diskusi (jumlah, L/P, latar belakang peserta).

## Bagan Kecenderungan dan Perubahan Sektor Pertanian

Desa		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Tim	1.	Ketua
	2.	Anggota
	3.	Anggota
	4.	Anggota

Jenis Usaha	Tahun 1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	Catatan
Pertanian musiman	*** *****	*** *****	*** *** ***	*** *** *	** ** *	** ** *	** *	Pertanian bergeser karena banyaknya peluang menjadi pegawai
Buruh tani	*** *****	*** *****	*** *** ***	*** ** *	*** ** *	** *	*	
Pertanian bunga	-	-	-	-	-	** *	** **	
Pegawai negeri	* *	** *	** ** **	** ** *	*** *** *	*** *** ***	*** *** *	Pendatang datang sebagai pegawai
Pegawai swasta	* *	** *	** ** **	** ** *	*** *** *	*** *** ***	*** *** ***	
Dagang	* *	** *	** ** **	** ** *	*** *** *	*** *** ***	*** *** ***	Pertanian tradisional kekurangan tenaga sehingga banyak diganti dengan tanaman impor yang dilakukan oleh sedikit orang dengan harga jual tinggi
Penduduk pendatang	-	* *	** *	** ** **	*** *** *	*** *** ***	*** *** ***	

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan dalam proses kegiatan:

- 1) Perubahan-perubahan apa yang terjadi di lingkungan desa? Misal iklim, kekeringan, banjir, erosi, perambahan hutan, dan lain-lain.
- 2) Adakah keterkaitan perubahan-perubahan lingkungan tersebut?
- 3) Apa kecenderungan perubahan di bidang ekonomi? Misal perubahan biaya hidup, upah buruh, produksi tanaman dan ternak, pemasaran hasil, pendapatan keluarga, dan lain-lain.

- 4) Apa kecenderungan perubahan di bidang kependudukan?  
Misal tingkat kelahiran dan kematian, perpindahan penduduk.
- 5) Keadaan apa yang makin baik dan makin buruk?
- 6) Perubahan-perubahan apa yang dampaknya/akibatnya/  
pengaruhnya berbeda terhadap laki-laki dan terhadap perempuan?

### **(5) Pembuatan Sketsa Kebun**

Teknik Pembuatan sketsa kebun merupakan teknik PRA yang memfasilitasi kegiatan pengkajian beberapa aspek pengelolaan kebun di wilayah tersebut . Hasil kajian digambarkan dalam bentuk sketsa atau peta kebun yang memperlihatkan berbagai aspek pengelolaan kebun tersebut terutama pada pola tanam dan teknologi yang diterapkan.

Jenis-jenis informasi kajian dalam pembuatan sketsa kebun adalah:

#### 1) Informasi Fisik

Pola tanam, luas lahan, jenis-jenis tanaman, praktek konservasi, tata letak sarana, pembagian lahan dan sebagainya.

#### 2) Informasi Non Fisik

Informasi pendapatan, pembinaan yang diperlukan (yang sudah/belum), teknologi yang khas di wilayah tersebut, informasi khusus misalnya lembaga adat, pengaturan lahan dan lain-lain.

Teknik sketsa kebun ini bertujuan untuk mengkaji keadaan dan pengelolaan kebun antara lain:

- 1) Keadaan berbagai aspek kebun seperti kesuburan, ketersediaan air, kebaikan/keburukan pola tanam, memuaskan teknologi, dan sebagainya.
- 2) Masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan kebun, apa penyebab dan akibatnya.

- 3) Bagaimana petani mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan untuk membantu dalam menggali pengetahuan dan teknologi lokal dalam berusahatani:

- 1) Adakah teknologi atau pengetahuan yang telah diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan usahatani? Bila ada sebutkan/tuliskan!
- 2) Dari mana asal teknologi atau pengetahuan tersebut?
- 3) Siapa yang biasanya menerapkan teknologi atau pengetahuan tersebut?
- 4) Untuk apa dan kapan teknologi atau pengetahuan tersebut digunakan?
- 5) Bagaimana cara menggunakan atau menerapkannya? (Buat bagan alur)!

Langkah penerapan:

- 1) Persiapan

- a. Pengamatan awal kebun, Tim PRA dengan Petani menyepakati kriteria kebun yang akan dikaji yaitu:
  - kebun tersebut mewakili keadaan kebun lain pada umumnya di desa dan menunjukkan keanekaragaman cara pengelolaan.
  - kebun itu merupakan kebun terbaik yang ada di desa atau sebaliknya.
- b. Pemilihan bersama hendaknya dapat menghilangkan bias, seperti hanya menampilkan kebun-kebun percobaan saja.

- 2) Pelaksanaan

- a. Bahas kembali maksud dan tujuan pembuatan sketsa kebun serta proses kegiatannya.

- b. Sepakati peserta kebun yang akan didatangi, datang ke kebun yang disepakati dengan berkeliling untuk melihat kebun-kebun yang lain.
- c. Mengamati kebun terpilih, kemudian mulai membuat sketsa. Sepakati simbol-simbolnya dan catat di sudut kertas beserta artinya.
- d. Mintalah masyarakat membuat sketsa tersebut sekaligus mendiskusikannya.
- e. Lakukan analisis sketsa kebun dan pengelolannya serta keterlibatan gender, tim PRA mencatat proses dan informasi yang dikaji selama proses diskusi.
- f. Cantumkan nama peserta, pemandu, tanggal dan tempat diskusi disudut gambar.

## **(6) Teknik Pembuatan Bagan Peringkat**

Teknik pembuatan bagan peringkat atau teknik analisa pilihan atau matriks ranking adalah teknik untuk mengkaji sejumlah topik dengan memberi nilai pada masing-masing aspek kajian berdasarkan sejumlah kriteria perbandingan. Kriteria perbandingan tersebut berdasarkan pendapat masyarakat sehingga sesuai dengan keadaan setempat. Biasanya yang dibandingkan adalah topik-topik bahasan terpenting yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan.

Jenis informasi kajian dalam teknik ini lebih merupakan teknik analisis daripada teknik untuk mengumpulkan informasi. Karenanya kegiatan ini biasanya untuk melengkapi kajian oleh teknik-teknik lainnya. Informasi-informasi yang dikaji ditentukan berdasarkan suatu keperluan tertentu. Jenis informasi kajian yang seringkali dilakukan antara lain adalah:

- 1) Pilihan teknologi pertanian (misal saat melakukan transek).
- 2) Pilihan jenis tanaman yang perlu dikembangkan (saat kunjungan kebun).
- 3) Pengurutan mata pencaharian-mata pencaharian utama.
- 4) Pengurutan kelas sosial masyarakat.

5) Pilihan masalah utama/prioritas yang perlu diatasi.

Tujuan teknik pembuatan bagan peringkat adalah:

- 1) Memfasilitasi pilihan masyarakat tentang sejumlah topik informasi dengan cara memberikan penilaian, sehingga bisa diperoleh status urutan atau peringkat keadaan. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam penilaian adalah: a) Manfaat-manfaat pilihan; b) Ketersediaan potensi-potensi untuk mengembangkan suatu hal/keadaan; c) Hambatan-hambatan yang ada untuk mengembangkan suatu hal/keadaan.
- 2) Secara sederhana pengurutan biasanya dilakukan untuk memberikan urutan jumlah (volume) suatu keadaan.

Langkah-langkah penerapan:

- 1) Sampaikan kembali informasi-informasi yang pernah disepakati yang memerlukan kajian dengan menggunakan bagan peringkat.
- 2) Jelaskan tujuan dan proses pembuatan bagan peringkat.
- 3) Sepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kriteria-kriteria penilaian antara lain mengenai manfaat pilihan, potensi yang tersedia, juga faktor-faktor pembatas (hambatan) dari setiap pilihan.
  - b. Simbol-simbol yang akan dipergunakan.
  - c. Cara melakukan penilaian serta skala nilai (1-10).
- 4) Mintalah masyarakat membuat bagan tersebut. Pemandu PRA mendampingi masyarakat dalam proses pembuatannya.
- 5) Sepakati pemberian nilai untuk masing-masing kriteria melalui proses diskusi. . Penentuan nilai didasarkan atas kesepakatan peserta, bukan pendapat seseorang.
- 6) Jumlahkan nilai dari masing-masing kriteria dari semua topik. Penjumlahan nilai tersebut merupakan nilai total dari setiap topik.

- 7) Diskusikan lebih lanjut matriks tersebut, serta periksa kembali pilihan–pilihan yang telah dilakukan. Sering muncul pertimbangan baru yang dapat merubah keputusan penilaian.
- 8) Catat semua proses diskusi, pendapat, pertimbangan, dan keputusan-keputusan yang dikemukakan oleh peserta (oleh tim PRA).
- 9) Cantumkan nama peserta, jumlah peserta, nama pemandu, tanggal dan tempat diskusi.

### **(7) Pembuatan Bagan Hubungan Kelembagaan/Diagram Venn**

Teknik pembuatan bagan hubungan kelembagaan merupakan teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara masyarakat dengan lembaga–lembaga yang terdapat di lingkungannya. Hasil pengkajian dituangkan dalam diagram Venn (sejenis diagram lingkaran/*interseccion*) yang akan menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh, dan dekatnya hubungan suatu lembaga dengan masyarakat.

Informasi yang dikaji adalah:

- 1) Lembaga secara umum yaitu informasi mengenai semua lembaga yang berhubungan dengan masyarakat desa, baik yang berada di dalam desa tersebut maupun yang berada di luar desa tetapi berhubungan dengan masyarakat desa. Hal-hal yang dikaji: lembaga lokal/tradisional, lembaga pemerintah, lembaga swasta.
- 2) Lembaga khusus yaitu informasi mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya lembaga yang kegiatannya berhubungan dengan pertanian saja.

Sumber informasi:

- 1) Sumber informasi utama adalah masyarakat yang secara langsung/tidak langsung mempunyai pengalaman menyangkut lembaga yang bersangkutan.
- 2) Informasi masyarakat dicek silang (*trianggulas*) dari pengelola lembaga yang bersangkutan.

3) Data sekunder bisa digunakan sebagai pembandingan.

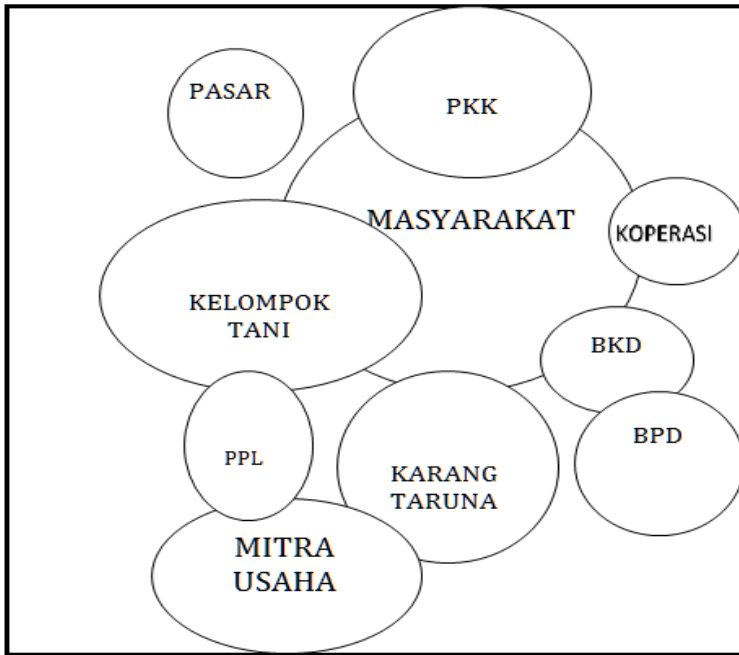
Tujuan kajian bagan hubungan kelembagaan adalah memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai:

- 1) Keberadaan, manfaat, dan perannya sebagai lembaga desa.
- 2) Saling hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut.
- 3) Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat di dalam kegiatan kelembagaan tersebut.

Langkah-langkah pelaksanaan:

- 1) Jelaskan maksud, tujuan, dan proses kajian kelembagaan desa.
- 2) Diskusikan mengenai jenis-jenis lembaga yang berhubungan dengan masyarakat desa secara langsung, baik itu yang berada di dalam desa atau di luar desa.
- 3) Mintalah masyarakat untuk membuat daftar nama lembaga-lembaga tersebut di atas kertas.
- 4) Fasilitasi masyarakat untuk diskusi kegiatan atau program yang telah dikembangkan oleh masing-masing lembaga, juga mengenai anggota dan pengurusnya.
- 5) Pemandu menjelaskan cara membuat bagan.
- 6) Sepakati penggunaan simbol, pengertian dan kriteria penting atau bermanfaatnya suatu lembaga, pengertian dan kedekatan suatu lembaga.
- 7) Pemandu meminta salah satu peserta diskusi untuk memilih besarnya lingkaran sebagai simbol lembaga tertentu yang telah didiskusikan dan dinilai kebermanfaatannya bagi masyarakat. Mesti diingat, pendapat ini harus pendapat bersama.
- 8) Menempatkan lingkaran kelembagaan dengan jarak yang telah disepakati terhadap lingkaran masyarakat.
- 9) Lakukan pemeriksaan kembali ketepatan informasi yang diperoleh.

- 10) Diskusikan dan bahas lebih lanjut bagan tersebut, terutama tentang masalah dan potensi kelembagaan, serta kegiatan dan pola hubungan yang diharapkan masyarakat
- 11) Catalah proses, pendapat, penilaian, dan seluruh informasi.



Gambar 3 Bagan Hubungan Kelembagaan/Diagram Venn

### (8) Penyusunan Kalender Musim

Teknik penyusunan kalender musim adalah teknik PRA yang memfasilitasi pengkajian kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang terjadi berulang dalam satu kurun waktu tertentu (musiman) dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan itu dituangkan dalam kalender kegiatan atau keadaan-keadaan, biasanya dalam jarak satu tahun musim ( 12 bulan).

Informasi-informasi yang biasanya muncul adalah:

- 1) Penanggalan atau sistem kalender yang biasa digunakan oleh masyarakat.
- 2) Iklim, curah hujan, ketersediaan air.
- 3) Pola tanam/panen, biaya pertanian, hasil pertanian dan tingkat produksi.
- 4) Ketersediaan pangan dan pakan ternak terutama pada masa paceklik.
- 5) Ketersediaan tenaga kerja.
- 6) Musim bekerja ke kota pada musim paceklik.
- 7) Masalah hama dan penyakit tanaman/ternak.
- 8) Kesehatan (musim wabah penyakit) dan kebersihan lingkungan.
- 9) Pola pengeluaran (konsumsi, produksi, investasi).
- 10) Kegiatan sosial kemasyarakatan, adat, agama, dan sebagainya.

Tujuan kajian kalender musim adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji:

- 1) Keadaan dan pola kegiatan masyarakat, sehingga diperoleh profil kegiatan utama mereka sepanjang tahun.
- 2) Profil kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu masyarakat, yaitu saat mereka sibuk bekerja, saat sibuk dengan kegiatan lain (sosial, agama, adat) dan saat mereka mempunyai waktu luang.
- 3) Tujuan utamanya adalah memfasilitasi diskusi mengenai masalah-masalah yang terjadi pada suatu keadaan atau dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.

Langkah-langkah kegiatan:

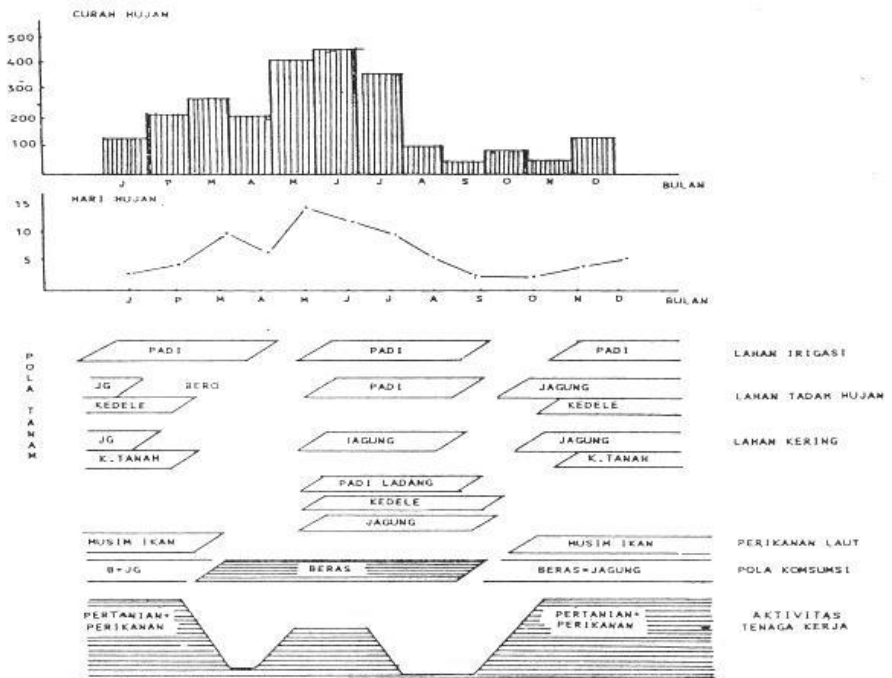
- 1) Terangkan maksud dan proses kegiatan.
- 2) Ajak masyarakat untuk mendiskusikan secara umum:
  - a. Jenis kegiatan apa yang paling sering terjadi dibulan-bulan tertentu.

- b. Apakah kegiatan itu selalu terulang dari tahun ke tahun.
  - c. Selain kegiatan, keadaan apa yang juga sering terjadi pada bulan-bulan tertentu (misalnya: kekeringan, wabah penyakit).
- 3) Setelah cukup tergambarkan, sepakatilah bersama peserta:
- a. Kegiatan-kegiatan utama yang akan dicantumkan ke dalam kalender serta perlu didiskusikan lebih lanjut.
  - b. Keadaan-keadaan kritis yang berakibat besar bagi masyarakat yang akan dicantumkan dalam kalender.
  - c. Simbol topik-topik bahasan yang dicantumkan dalam bagan berupa gambar-gambar sederhana yang mudah dikenali.
  - d. Simbol untuk memberikan nilai dengan bahan-bahan lokal yang tersedia (biji jagung, kerikil, dan lain-lain).
- 4) Mintalah masyarakat untuk menggambarkan kalender di atas kertas besar yang ditempelkan di dinding yang mencantumkan kolom topik-topik informasi sesuai dengan hasil diskusi.
- 5) Cantumkan di sudut kertas simbol-simbol beserta artinya, serta penjelasan lain untuk memahami gambar.
- 6) Lakukan analisis kalender musim yaitu:
- a. Apa sebab terjadi masalah-masalah di dalam pengelolaan kegiatan mereka.
  - b. Apa sebab terjadi masa-masa kritis dimasyarakat (kekeringan, wabah, paceklik, dan sebagainya).
  - c. Apakah ada hubungan sebab akibat masalah-masalah dengan keadaan-keadaan tersebut.
  - d. Apakah ada jalan keluar masyarakat untuk mengatasinya.
- 7) Catatlah seluruh masalah, potensi, informasi yang muncul dalam diskusi dengan cermat, sebab hasil penggalian ini akan menjadi bahan bagi kegiatan penerapan teknik lain (Tim PRA mencatat proses dan hasil diskusi).
- 8) Cantumkan peserta, pemandu, tanggal, dan tempat diskusi.

## Kalender Musiman

Desa	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Tim	1. Ketua
	2. Anggota
	3. Anggota
	4. Anggota
	5. Anggota
	6. Anggota
	7. Anggota
	8. Anggota
	9. Anggota
	10. Anggota

## Contoh Kalender Musiman



Gambar 4 Kalender Musiman

## **(9) Kajian Mata Pencaharian**

Teknik kajian mata pencaharian adalah teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai berbagai aspek mata pencaharian masyarakat. Jenis-jenis mata pencaharian beserta aspek-aspeknya, digambarkan dalam sebuah bagan.

Jenis informasi kajian dalam kajian mata pencaharian adalah:

- 1) Kajian mata pencaharian bidang pertanian seperti pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
- 2) Mata pencaharian bidang non pertanian seperti industri makanan, pertentunan, kerajinan, gerabah, dan lain-lain.
- 3) Mata pencaharian bidang jasa seperti buruh, tukang, dan lain-lain.

Sumber informasi dalam kajian mata pencaharian adalah:

- 1) Langsung dari masyarakat.
- 2) Pelaku mata pencaharian yang bersangkutan.
- 3) Data sekunder.

Tujuan kajian mata pencaharian adalah memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai aspek-aspek dari mata pencaharian masyarakat baik yang dilakukan di dalam desa maupun di luar desa dengan kajian:

- 1) Jumlah orang yang melakukan setiap jenis mata pencaharian.
- 2) Keadaan mata pencaharian tersebut(memenuhi kebutuhan/ tidak).
- 3) Keadaan pasar dan pemasaran.
- 4) Ketersediaan dan keadaan bahan baku.
- 5) Ketersediaan dan keadaan tenaga kerja, baik perempuan maupun laki-laki dan ketrampilannya.
- 6) Tingkat pendapatan.
- 7) Perubahan-perubahan jenis pekerjaan yang berkembang akibat pembangunan.

Langkah penerapan:

1) Persiapan

Menggali pengetahuan awal peserta tentang jenis-jenis mata pencaharian dan mengkaji data sekunder.

2) Pelaksanaan

- Terangkan maksud dan proses pelaksanaan kegiatan
- Mintalah peserta menuliskan semua jenis-jenis mata pencaharian yang sebelumnya didiskusikan lebih dahulu.
- Bahaslah berbagai keadaan pekerjaan tersebut antara lain pekerjaan masyarakat yang paling utama dan masalah-masalah di dalam pekerjaan tersebut.

3) Sepakati bersama jenis pekerjaan yang akan dicantumkan ke dalam bagan yang akan didiskusikan lebih lanjut.

- Aspek-aspek kajian yang akan dibahas tentang mata pencaharian
- Simbol topik bahasan yang dicantumkan dalam bagan
- Simbol untuk memberi nilai.

4) Mintalah masyarakat untuk membuat bagan di atas kertas besar dan tempelkan di dinding beserta topik-topik informasi hasil diskusi.

5) Cantumkan simbol dan artinya di pojok kertas.

6) Bagan didiskusikan kembali terutama mengenai masalah-masalahnya.

7) Catat seluruh masalah, potensi, dan informasi yang muncul.

8) Cantumkan nama peserta, jumlah peserta, nama pemandu, tempat dan tanggal pelaksanaan diskusi.

Bulan Sumber Pendapatan	1 Jan	2 Feb	3 Mar	4 Apr	5 Mei	6 Jun	7 Jul	8 Ags	9 Sep	10 Okt	11 Nov	12 Des	Jumlah	Ranking
Tembakau	•	•• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	II
Ayam	••	•• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15	I
Kambing								•• ••	•• ••				8	IV
Sapi							•• •• ••						6	V
Kacang tanah								•	••	•• ••			6	V
Kacang Hijau						•• ••							4	VI
Sayur Petai							•• •						3	VII
Telur Ayam	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	III
Catatan : Nilai didasarkan atas jumlah uang yang dihasilkan perbulan. Ranking diberikan atas dasar jumlah uang yang dihasilkan pertahun. Teknik ini merupakan gabungan antar matriks ranking daengan kalender musim.														

## 2. Identifikasi Data Sekunder

Pengumpulan dan pengolahan data sekunder adalah proses untuk mempelajari keadaan desa/wilayah berdasarkan data informasi yang telah ada dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak tertentu (dinas/ instansi/LSM dan lain-lain).

Data sekunder diperlukan sebagai dasar dalam memahami kondisi wilayah dan masyarakatnya dalam rangka mengidentifikasi data/informasi apa yang diperlukan dalam kegiatan PRA. Tujuan identifikasi data sekunder adalah:

- 1) Untuk mengetahui gambaran dasar keadaan wilayah, baik masyarakat dan juga lingkungannya .
- 2) Sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat pada teknik/instrumen PRA lainnya .

Pengumpulan data sekunder harus terarah sesuai dengan tujuan pelaksanaan PRA. Jika pengumpulan data sekunder ini sejak awal tidak diarahkan dengan baik, maka tim akan menghabiskan waktu mengumpulkan data yang tidak diperlukan atau bahkan membingungkan.

Di desa-desa terpencil, biasanya sulit untuk mendapatkan dokumen tentang keadaan wilayah tersebut, tetapi data sekunder kini sifatnya sebagai data pendukung dari informasi/data yang diperoleh secara langsung melalui teknik/instrumen PRA.

Beberapa jenis data sekunder yang dikumpulkan sebagai data pendukung PRA untuk penyuluhan agribisnis diantaranya: Data agroklimat wilayah; Batas wilayah; Kependudukan; Kelembagaan formal dan non formal yang ada di wilayah; Tata guna lahan; Jenis usaha masyarakat; Tingkat pendapatan rata-rata; Sarana dan prasarana di wilayah; Program-program pembangunan pertanian yang sedang berjalan atau yang pernah dilaksanakan di wilayah; Teknologi yang diterapkan; Data produksi, luasan areal usaha tani, jumlah ternak dan komoditi utama yang dikembangkan di wilayah.

Tahapan pelaksanaan identifikasi data sekunder:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk menyusun perencanaan penyuluhan agribisnis desa. .
- 2) Memilih dan memilah data/informasi mana yang sudah tersedia, sudah dikumpulkan atau didokumentasikan oleh pihak lain (dinas/instansi/LSM dan lain-lain).
- 3) Mendiskusikan dimana dan siapa sumber setiap jenis data yang dimaksud sebelum membagi tugas diantara anggota tim untuk melakukan pengumpulan data.
- 4) Menyajikan data/informasi yang telah dikumpulkan agar semua anggota tim dapat membaca, mengerti, dan memahami kondisi/keadaan wilayahnya .
- 5) Melakukan telaah bersama pada setiap topik yang berkaitan dengan pengkajian yang akan dilakukan, misalnya dengan menghubungkan antara satu data dengan data lainnya sehingga dapat terlihat masalah-masalah, potensi, atau peluang pengembangan agribisnis di wilayah tersebut.

## Data Monografi dan Potensi

### Penduduk

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (org)	Jumlah Keluarga (KK) Tani	JUMLAH KELUARGA TANI (KK)					
				Pemelik Lahan Tidak menggarap	Pemilik lahan Penggarap	Penggarap	Buruh Tani	Total	

### Tanah

No.	Nama Desa	Tanah Darat (Ha)			Tanah Sawah irigasi (Ha)				Kolam (Ha)	Tambak (Ha)	Jumlah Tanah Pertanian
		Tegalan	Pekarangan	Jumlah	Teknis	½ Teknis	Tersier	Tadaj Hujan			

No	Tahun Bulan	200...		200...		200...		200....	
		Jumlah mm <sup>3</sup>	Jumlah Harinya	Jumlah mm <sup>3</sup>	Jumlah Harinya	Jumlah mm <sup>3</sup>	Jumlah Harinya	Jumlah mm <sup>3</sup>	Jumlah Harinya
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

## C. ANALISIS DAN PERUMUSAN MASALAH

Analisis PRA tingkat desa dilakukan setelah semua data/informasi diperoleh melalui teknik/instrumen PRA dan data sekunder. Proses analisis ini dilakukan oleh seluruh anggota tim, apabila diperlukan dapat pula dilibatkan nara sumber lain yang dapat melengkapi informasi yang telah diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis PRA ini adalah:

## 1) Analisis Potensi

- a. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari setiap instrumen/teknik yang telah dikumpulkan, maka lakukanlah rekapitulasi potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut yang menyangkut potensi: Sumber daya manusia; Sumber daya alam; Kelembagaan sistem dan usaha agribisnis.
- b. Diskusikan kembali hasil rekapitulasi potensi, barangkali masih ada potensi yang belum terinventarisasi pada hasil pengumpulan data melalui instrumen PRA.
- c. Kelompokkan potensi-potensi yang sama, karena mungkin saja ada kesamaan potensi yang ada di masing-masing wilayah dusun/RW, sehingga akan diperoleh rekapitulasi potensi yang ada di desa.

Tabel 1 Rekapitulasi Potensi Desa

Aspek	Potensi	Dusun/ RW I	Dusun/ RW II	Dusun/ RW III
Sumberdaya manusia				
Sumberdaya alam				
Kelembagaan sistem dan usaha agribisnis				
Sarana dan Prasarana sistem dan usaha agribisnis				

### *Analisis Masalah:*

- a. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari setiap instrumen/teknik yang telah dikumpulkan maka lakukanlah rekapitulasi masalah-masalah yang ada di wilayah tersebut yang menyangkut masalah: Sumber daya manusia; Sumber daya alam; Kelembagaan sistem dan usaha agribisnis.
- b. Diskusikan kembali hasil rekapitulasi masalah, barangkali masih ada masalah yang belum terinventarisasi pada hasil pengumpulan data melalui instrumen PRA.

- c. Kelompokkan masalah-masalah yang sama, karena mungkin saja ada kesamaan masalah yang ada di masing-masing wilayah dusun/RW, sehingga akan diperoleh rekapitulasi masalah yang ada di desa.
- d. Melakukan pemeringkatan dan urutan prioritas masalah, dengan menggunakan teknik pemeringkatan yang disepakati. Apabila data/informasi dari hasil pemeringkatan telah dilakukan untuk masing-masing dusun/RW maka data tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeringkatan di tingkat desa. Apabila masalah yang ditemukan di desa cukup banyak, sepakatilah masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas. Pilih 3-5 masalah prioritas dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disepakati misalnya: dihadapi oleh sebagian besar petani, memiliki nilai strategis dan lain-lain.
- e. Merumuskan faktor penyebab masalah dari urutan masalah prioritas yang telah disusun secara partisipatif.

Tabel 2 Rekapitulasi Masalah di Tingkat Desa

Aspek	Masalah	Dusun/ RW I	Dusun/ RW II	Dusun/ RW III
Sumberdaya manusia				
Sumberdaya alam				
Kelembagaan sistem dan usaha agribisnis				
Sarana dan Prasarana sistem dan usaha agribisnis				

Aspek	Peringkat Masalah	Dusun/ RW I	Dusun/ RW II	Dusun/ RW III
Sumberdaya manusia				
Sumberdaya alam				
Kelembagaan sistem dan usaha agribisnis				
Sarana dan Prasarana sistem dan usaha agribisnis				

Tabel 3 Peringkat Masalah dan Faktor Penyebab Masalah di Tingkat Desa

Aspek	Peringkat Masalah	Faktor Penyebab Masalah	Potensi	Ket
Sumberdaya Manusia	1.....	1..... 2.....		
	2.....	1..... 2..... 3.....		
	3.....	1..... 2.....		
Sumberdaya alam	1.....	1..... 2.....		
	2.....	1..... 2..... 3.....		
	3.....	1..... 2.....		
Kelembagaan sistem dan usaha agribisnis	1.....	1..... 2.....		
	2.....	1..... 2..... 3.....		
	3.....	1..... 2.....		
Sarana dan Prasarana sistem dan usaha agribisnis	1.....	1..... 2..... 3.....		
	2.....	1..... 2.....		

Tabel 4 Analisis Hasil PRA di Tingkat Desa

**Potensi Agroekosistem**

Nama Desa : .....

Tahun : .....

No.	Jenis Usahatani (pada lahan)	Jumlah luas tanam (Ha)	Jumlah KK Petani	Rata2 luas perorang (Ha/org)	Produksi ditingkat Kec. (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Lahan Sawah irigasi a					
2	b dst Lahan sawah tadah hujan a					
3	b dst Lahan sawah pasang surut a					
4	b dst Lahan Kering a					
5	b dst Perairan umum: Perairan pantai a					
	b Danau a					
	b Sungai a					
6	b Usaha off farm a					
	b dst					

## Data kelembagaan

### 1. Kelembagaan Petani

#### a. Jumlah Kelembagaan

No	Nama Desa	Jml Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani							
			Tani Dewasa		Tani Wanita		Taruna Tani			
			Jml Kel.	Jml Angg.	Jml Kel.	Jml Angg.	Jml Kel.	Jml Angg.		

#### b. Nama Kelompok Tani dan kedudukan

No.	Nama Desa	Nama Kelompok	Nama Pengurus				Jumlah Anggota	Modal Kelompok	Jenis usaha Tani Pokok (Utama)	Luasan		
			Ketua	Wakil	Sekretaris	Bendahara				Ha	ekor	Petak

#### c. Nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kedudukan

No.	Nama Desa	Nama Gapoktan	Nama Pengurus				Jumlah Anggota	Modal Gapoktan	Jenis usaha Tani Pokok (Utama)	Luasan		
			Ketua	Wakil	Sekretaris	Bendahara				Ha	ekor	Petak

### 2. Kelembagaan Ekonomi Pedesaan

No	Nama Desa	Jumlah BUUD/KUD		Koperasi Pertanian diluar KUD		Bank Unit Desa (BPR,BRI)	Kios Saprotan	Lembaga Swadaya Desa (LSD)	Lumbung padi/desa
		Buah	Anggota	Buah	Anggota				

## Data Usaha Tani Petani/Kelompokan

### 1. FASILITAS USAHATANI PETANI / KELOMPOK TANI

#### a. Pertanian

No	Nama Desa	Kepemilikan												
		Jumlah Huller			Hand sprayer			Motor/power sprayer			Traktor			
		Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	

#### b. Ternak

No	Nama Desa	Kepemilikan												
		Mesin Tetas			Inseminasi Buatan			Alat pendingin			Kandang			
		Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	

#### c. Perkebunan

No	Nama Desa	Kepemilikan												
		Jumlah Huller			Hand sprayer			Motor/power sprayer			Traktor			
		Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	Milik petani	Milik dinas	Milik swasta	

## 2. PRODUKSI USAHA TANI

#### a. Pertanian

No	Nama Desa	Jenis Tanaman			Luas		Produksi rata-rata tiap Ha (Kw)	Harga rata-rata produksi waktu panen per Kw (Rp.)	Biaya produksi rata-rata tiap Ha (Rp.)	Jumlah Petani Pelaksana	Keterangan
		Tanaman pangan	Hortikultura	Perkebunan	Tanam (Ha)	Panen (Ha)					

#### b. Ternak

No.	Nama Desa	Jenis Ternak								Keterangan
		Kerbau (ekor)	Sapi (ekor)	Kambing (ekor)	Domba (ekor)	Ayam (ekor)	Bebek (ekor)	Babi (ekor)	Lain-lain	

### c. Perkebunan Rakyat

No.	Nama Desa	Tanaman .....				Tanaman.....				Tanaman .....			
		Luas		Produksi		Luas		Produksi		Luas		Produksi	
		Ha	Pohon	Jumlah	Satuan	Ha	Pohon	Jumlah	Satuan	Ha	Pohon	Jumlah	Satuan

### d. Hortikultura

No.	Nama Desa	Tanaman .....				Tanaman.....				Tanaman .....			
		Luas		Produksi		Luas		Produksi		Luas		Produksi	
		Ha	Pohon	Jumlah	Satuan	Ha	Pohon	Jumlah	Satuan	Ha	Pohon	Jumlah	Satuan

### e. Pemasaran

No	Nama Desa	Nama Kelompok	Lokasi Pemasaran produk	Jenis Produksi yang dipasarkan

### f. Kemitraan

No	Nama Desa	Nama Kelompok	Mitra	Jenis/bentuk Kemitraan	Tahun kemitraan

### Matrik 1. Identifikasi Masalah dan Upaya Pemecahannya

Nama Desa : .....

Tahun : .....

No.	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi	Tindakan/Kegiatan yang Dibutuhkan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

## Matrik 2. Uji Peroritas Masalah Dan Faktor Penentu

### Uji Prioritas Masalah

No	Jenis Masalah	Skor			Jumlah Skor
		Gawat	Mendesak	Penyebaran	
1.	Pupuk tidak tersedia	4	2	4	10
2.					
3.					
n.					

Gawat *)	3**)
Agak gawat	2
Tidak gawat	1
Mendesak	3
Agak mendesak	2
Tidak mendesak	1
Penyebaran tinggi	3
Penyebaran cukup	2
Penyebaran rendah	1

\*) Skor ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan petani

\*\*\*) Jumlah skor tertinggi menjadi prioritas

### Daftar Faktor Penentu

Jenis Usahatani	Urutan prioritas masalah	Tinjauan Aspek Masalah		
		Pengetahuan	Ketrampilan	Sikap

# **BAB II**

## **PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN**

### **A. LATAR BELAKANG PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP<sub>3</sub>K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

Agar *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumber daya dan program-program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komperhensif dengan memadukan seluruh sumber daya yang tersedia.

*Programa Penyuluhan Pertanian* merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. *Programa Penyuluhan Pertanian* yang disusun setiap tahun, membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP<sub>3</sub>K) juga

mengamanatkan bahwa program penyuluhan pertanian terdiri dari program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional. Agar program penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan, maka penyusunan program penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.

*Programa Penyuluhan Pertanian* disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan. Keterpaduan mengandung maksud bahwa program penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan program pertanian penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan kesinergian yaitu bahwa program penyuluhan pertanian pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian, semua program penyuluhan pertanian selaras dan tidak bertentangan antara program penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan;
2. Naskah program penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
3. Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas/instansi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota;
4. Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait;
5. Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas (kurang partisipatif).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), maka program penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian *spesifik lokalita* yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/ instansi terkait.

Programa penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan. Dengan memosisikan program pertanian secara strategis, maka diharapkan masalah-masalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, dapat diatasi.

## **B. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN PRINSIP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

*Programa Penyuluhan Pertanian* didefinisikan berdasarkan tingkatan wilayah pemerintahan, yaitu *Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota* serta *Programa Penyuluhan Kecamatan dan Kelurahan/Desa*. Oleh karena itu, pengertian Program penyuluhan Pertanian yaitu:

1. *Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota* adalah program penyelenggaraan

Penyuluhan Pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

2. *Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa/Kelurahan* adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Di dalam *Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian* ini, ada beberapa makna yang harus dipahami, yaitu:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Potensi Usaha Tani adalah peluang usaha tani dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agrosistem setempat, sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

5. Produktivitas Usaha Tani adalah perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini (faktual), maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
6. Lingkungan Usaha Tani adalah kondisi ketersediaan prasarana dan sarana usaha yang meliputi saluran irigasi, agro input, alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani.
7. Perilaku adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir.
8. Non Perilaku adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha, berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani.
9. Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian hubungan keterkaitan dan saling ketergantungan diantara sub-sub sistem kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian yang mempengaruhi keberhasilan Penyuluhan Pertanian.
10. Penyuluh Pertanian, baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

13. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
14. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
15. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha Pelaku Utama dan/Pelaku Usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
18. Rembugtani Desa adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan Petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam Mimbar Sarasehan kecamatan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

20. Komoditas Pertanian Strategis Nasional adalah jenis-jenis komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas prioritas di tingkat nasional karena perannya yang strategis dalam pencapaian ketahanan pangan nasional.
21. Komoditas Unggulan adalah jenis-jenis komoditas pangan yang potensial dikembangkan di daerah-daerah tertentu sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat.

Maksud dan tujuan *Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian*:

1. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara.
2. Memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian.
3. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum *Musrenbangtan* tahun berikutnya.

Prinsip-prinsip *Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian* yaitu:

1. Partisipatif, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Penyuluh pertanian mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2. Bermanfaat, yaitu hasil programa Penyuluhan Pertanian yang sudah disusun pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan;
3. Terpadu, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah,

dengan berdasarkan kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

4. Sinergi, yaitu programa Penyuluhan Pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat.
5. Transparan, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan prinsip keterbukaan, sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan;
6. Demokratis, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian disusun dengan saling memperhatikan dan menyeraskan program Pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lainnya;
7. Bertanggung gugat, yaitu evaluasi programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan programa penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu dan permasalahan yang dihadapi.
8. *Specific, Measurable, Actionary, Realistic, Time Frame (SMART)* yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan/dapat dilakukan, sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan.
9. *Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD)* yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran,perubahan Perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai.

## **C. PENGORGANISASIAN**

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi proses penyusunan program Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan, diperlukan pembentukan Tim Penyusun Program Penyuluhan Pertanian, dengan struktur dan susunan keanggotaan serta tugas sebagai berikut:

### **1. Struktur dan Susunan Keanggotaan**

Struktur dan susunan keanggotaan tim penyusun program Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan sebagai berikut:

#### **1) Tim Penyusun Program Nasional**

Tim Penyusun Program Nasional terdiri atas:

Ketua:

Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang program dan evaluasi pada Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Sekretaris :

Koordinator Penyuluh Pertanian Pusat.

Anggota :

- a. Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian pada BPPSDMP;
- b. Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada BPPSDMP;
- c. Pejabat eselon IV lingkup Pusluhtan pada BPPSDMP;
- d. Kelompok Penyuluh Pertanian di Pusat;
- e. Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha tingkat nasional.

#### **2) Tim Penyusun Program Provinsi**

Ketua :

Pejabat struktural pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang program penyuluhan pertanian di provinsi.

Sekretaris :

Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi.

Anggota :

- a. Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi;
- b. Kelompok Penyuluh Pertanian pada Dinas Provinsi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);
- c. Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di provinsi.

3) Tim Penyusun Programa Kabupaten/Kota

Ketua :

Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang program penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

Sekretaris :

Koordinator Penyuluh Pertanian kabupaten/kota.

Anggota :

- a. Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
- b. Kelompok Penyuluh Pertanian pada unit kerja lingkup pertanian kabupaten/kota;
- c. Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kabupaten/kota.

4) Tim Penyusun Programa Kecamatan

Ketua :

Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.

Sekretaris :

Penyuluh Urusan Programa (Programmer).

Anggota :

- a. Kelompok Penyuluh Pertanian pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan;
- b. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan;
- c. Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kecamatan.

5) Tim Penyusun Programa Desa/Kelurahan

Ketua :

Ketua Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes).

Sekretaris :

Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan.

Anggota:

- a. Kepala Urusan Pembangunan Desa/ Kelurahan;
- b. Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di desa/kelurahan.

## 2. Tugas Tim Penyusun Programa

Tim penyusun programa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja;
- 2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya;
- 3) Menyiapkan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- 4) Menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif programa Penyuluhan Pertanian (termasuk dukungan prasarana sarana dan pengaturan) untuk diusulkan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang dalam bentuk daftar usulan kegiatan dan pembiayaan yang dilengkapi dengan kerangka acuan;
- 5) Menyiapkan pertemuan penyusunan programa pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan;
- 6) Melaksanakan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian;
- 7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

## **D. PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN**

Penyusunan program Penyuluhan Pertanian memperhatikan unsur, proses dan tahapan penyusunan program sebagai berikut:

### **1. Unsur-Unsur Program Penyuluhan**

Unsur merupakan substansi program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program Penyuluhan Pertanian, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **(1) Keadaan**

Keadaan berisikan data dan informasi faktual mengenai:

- 1) Potensi, produktivitas dan produksi Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain;
- 2) Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani; dan
- 3) dukungan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Lingkungan Usaha Tani.

#### **(2) Tujuan**

Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan:

1. Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani;
2. Dukungan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
3. Upaya menciptakan Lingkungan Usaha Tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya.

#### **(3) Permasalahan**

Permasalahan berkaitan dengan Perilaku dan Non Perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang akan dicapai.

1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/ teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
2. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/ bibit, atau modal.

Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha;
- 2) Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektifitas dan efisiensi pelaku usaha; dan
- 3) Apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/ inovasi untuk pemecahan masalah.

Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (*impact point*) dan teknik pemeringkatan masalah lainnya.

#### (4) Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) pelaku utama dan pelaku usaha;
- 2) Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian;
- 3) Tingkat kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) Penyuluh Pertanian;
- 4) Situasi lingkungan fisik sosial dan budaya yang ada; dan
- 5) Alokasi pembiayaan yang tersedia.

Selain itu, rencana kegiatan yang dibuat harus memuat unsur-unsur: Siapa yang akan melaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?; Berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas)?; Berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dan lain-lain)?; Bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)? Rencana kegiatan akan disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab pelaksanaan dan pihak terkait.

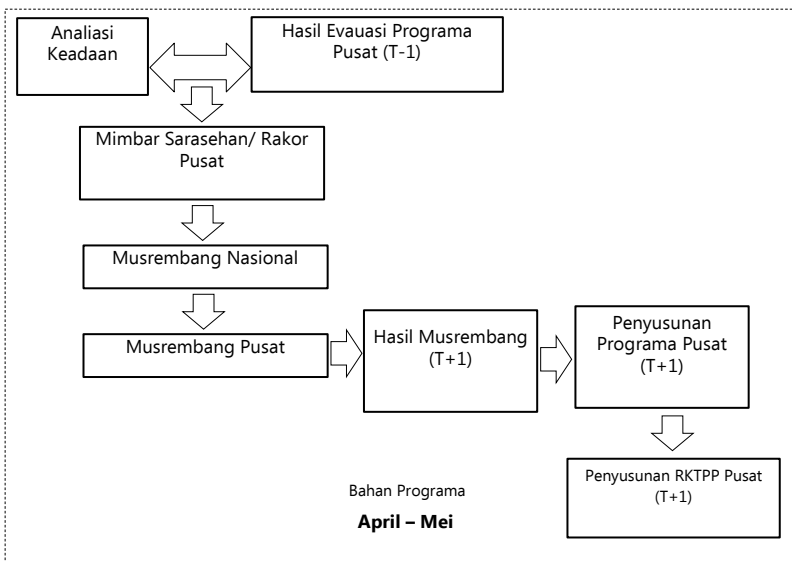
## **2. Proses**

Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian mulai dari Rembugtani Desa, Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional melalui proses sebagai berikut:

- 1) Tingkat Nasional
  - a. Kepala BPPSDMP selaku penanggung jawab penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional, memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian nasional;
  - b. Pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional dimulai dengan melakukan analisis keadaan;
  - c. Selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi programa Penyuluhan Pertanian nasional tahun

- sebelumnya (T-1), guna mengukur keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Pusat sekaligus memberi umpan balik terhadap program Penyuluhan Pertanian nasional tahun berikutnya (T+1);
- d. Hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan nasional tahun berjalan;
  - e. Kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan nasional menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbangtan nasional.
  - b. Musrenbangtan nasional yang dilaksanakan sekitar bulan April - Mei tahun berjalan;
  - c. Hasil definitif musrenbangtan nasional menjadi bahan dalam penyusunan program Penyuluhan Pertanian nasional tahun berikutnya (T+1);
  - d. Penyusunan program Penyuluhan Pertanian nasional dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh sekretaris direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi
  - e. dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, seluruh Penyuluh pertanian pusat, dan perwakilan organisasi Petani di tingkat nasional;
  - f. Program Penyuluhan Pertanian nasional disahkan oleh Kepala BPPSDMP dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Alur proses penyusunan program nasional dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini.



Gambar 5 Tahapan Penyusunan Prgrama Nasional

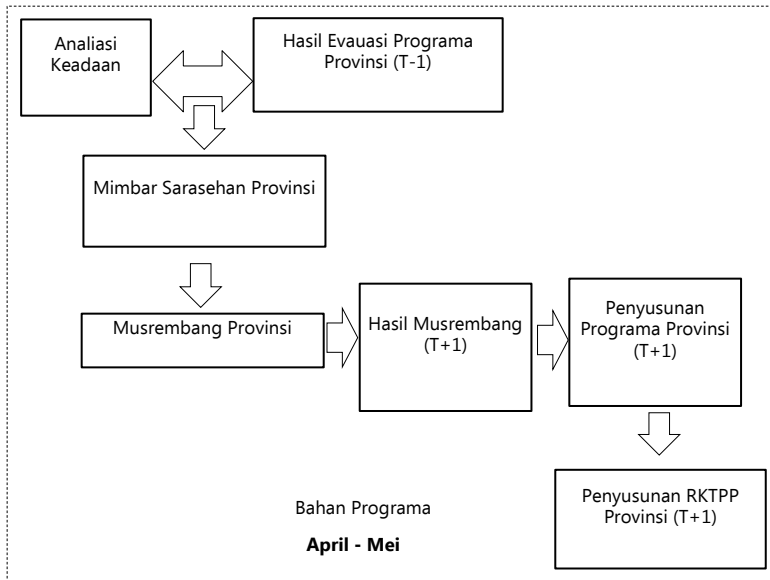
## 2) Tingkat Provinsi

- a. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi selaku penanggung jawab penyusunan program Penyuluhan Pertanian provinsi memfasilitasi pembentukan tim penyusun program Penyuluhan Pertanian di provinsi;
- b. pelaksanaan penyusunan program Penyuluhan Pertanian provinsi dimulai dengan melakukan analisis keadaan;
- c. selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi program Penyuluhan Pertanian provinsi tahun sebelumnya (T-1), guna mengukur keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di provinsi sekaligus memberi umpan balik terhadap program Penyuluhan Pertanian provinsi tahun berikutnya (T+1);
- d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan

sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan provinsi;

- e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan provinsi menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam musrenbangtan provinsi yang dilaksanakan sekitar bulan April – Mei tahun berjalan;
- f. hasil definitif musrenbangtan provinsi menjadi bahan dalam penyusunan program Penyuluhan Pertanian provinsi tahun berikutnya (T+1);
- g. penyusunan program Penyuluhan Pertanian provinsi dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja lingkup pertanian provinsi sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, dinas terkait, seluruh Penyuluh pertanian pada kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi, pejabat fungsional bidang pertanian lain di kabupaten/kota, dan perwakilan organisasi Petani di provinsi;
- h. program Penyuluhan Pertanian provinsi disahkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPPSDMP.

Alur proses penyusunan program provinsi dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini:



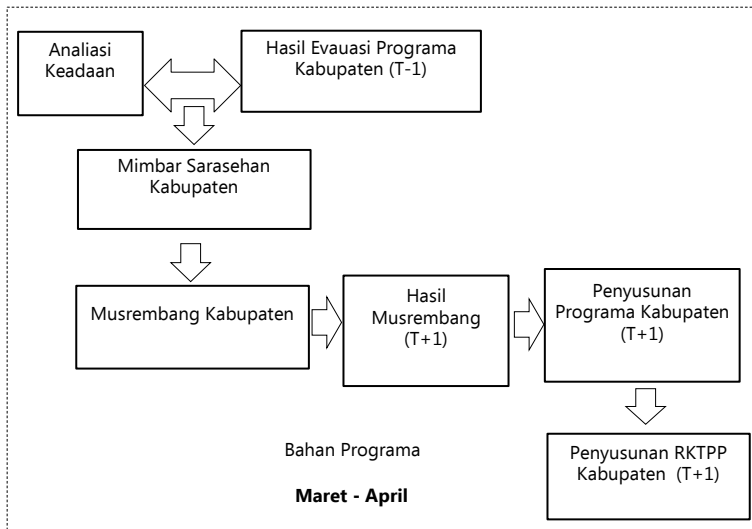
Gambar 6 Proses Penyusunan Program Provinsi

### 3) Tingkat Kabupaten/Kota

- a. pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyusunan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan tim penyusun program Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penyusunan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota dimulai dengan melakukan analisis keadaan;
- c. selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota sekaligus memberi umpan balik terhadap

- programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun berikutnya (T+1);
- d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan kabupaten/kota;
  - e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan kabupaten/ kota menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/ kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan sekitar bulan Maret - April tahun berjalan;
  - f. hasil definitif Musrenbang kabupaten/kota menjadi bahan dalam penyusunan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kotatahun berikutnya (T+1);
  - g. penyusunan program Penyuluhan Pertanian kabupaten/ kota dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja lingkup pertanian kabupaten/kota sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, seluruh Penyuluh pertanian pada kelembagaan yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, petugas fungsional bidang pertanian lain di kabupaten/kota dan perwakilan organisasi Petani di kabupaten/kota;
  - h. program Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota disahkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi.

Alur proses penyusunan program kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini:



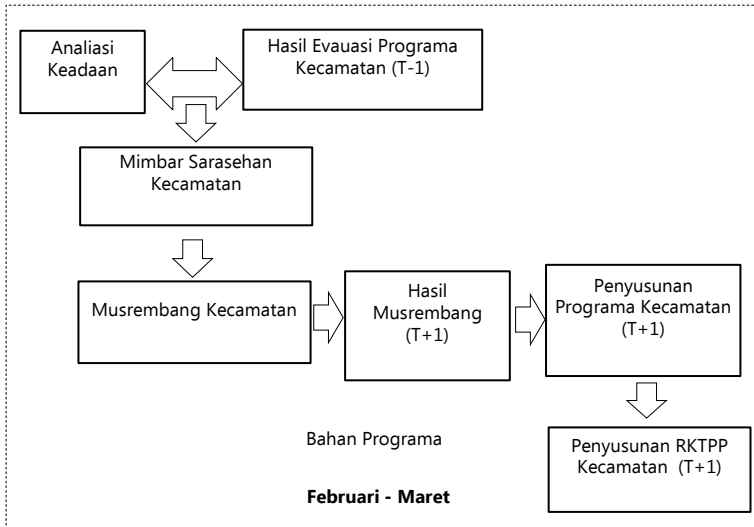
Gambar 7 Proses Penyusunan Program Kabupaten

#### 4) Tingkat Kecamatan

- a. pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan kecamatan selaku penanggung jawab penyusunan program penyuluhan kecamatan memfasilitasi pembentukan tim penyusun program penyuluhan kecamatan;
- b. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan kecamatan dimulai dengan melakukan analisis keadaan yang diperoleh dari hasil rekapitulasi PRA desa/kelurahan atau teknik identifikasi keadaan wilayah yang lain;
- c. selain melakukan analisis keadaan, Penyuluh Pertanian di kecamatan melakukan evaluasi program penyuluhan kecamatan tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kecamatan sekaligus memberi umpan balik terhadap program kecamatan tahun berikutnya (T+1);

- d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan kecamatan;
- e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan kecamatan menjadi usulan indikatif dan kualitatif kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Februari - Maret tahun berjalan;
- f. hasil definitif Musrenbang kecamatan menjadi bahan dalam penyusunan program Penyuluhan Pertanian kecamatan tahun berikutnya (T+1);
- g. penyusunan program Penyuluhan Pertanian kecamatan dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Penyuluh pertanian di wilayah unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan, UPTD lain yang membidangi pertanian, pejabat fungsional bidang pertanian lain di kecamatan. Dalam hal wilayah unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka program Penyuluhan Pertanian dibuat untuk setiap kecamatan;
- h. program Penyuluhan Pertanian kecamatan disahkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.

Alur proses penyusunan programa kecamatan dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini:



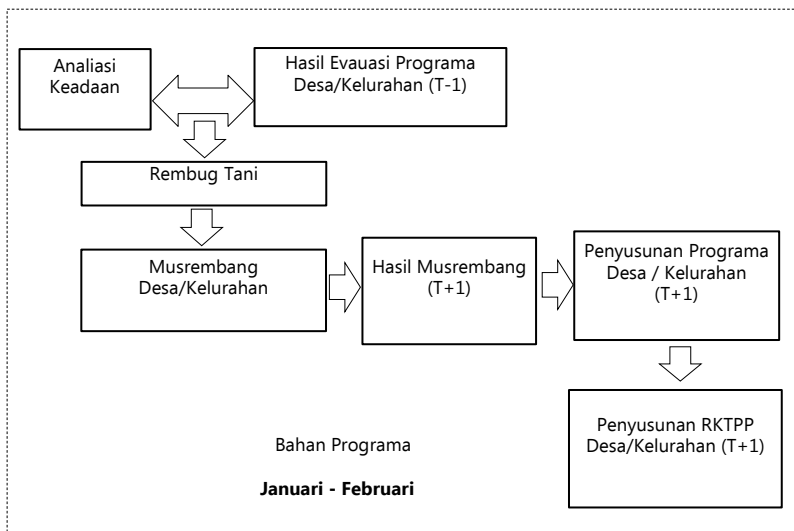
Gambar 8 Proses Penyusunan Programa Kecamatan

## 5) Tingkat Desa/Kelurahan

- a. Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bekerjasama dengan Ketua Posluhdes. Dalam hal Posluhdes belum terbentuk, maka program Penyuluhan Pertanian mengacu pada RKTTP;
- b. pelaksanaan penyusunan program desa/kelurahan dimulai dengan analisis keadaan melalui pelaksanaan PRA atau teknik identifikasi keadaan wilayah lain oleh Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Urusan Program (Programmer) pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan dengan melibatkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- c. selain melakukan analisis keadaan, Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan bersama-sama dengan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha berkewajiban melakukan evaluasi program penyuluhan desa/kelurahan tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di desa/kelurahan sekaligus memberi umpan balik terhadap program desa/kelurahan tahun berikutnya (T+1);
- d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Rembugtani Desa/Kelurahan;
- e. kesepakatan dalam Rembugtani Desa/kelurahan menjadi usulan indikatif dan kualitatif kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang desa/kelurahan. Musrenbang desa/kelurahan diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Januari-Februari tahun berjalan;
- f. hasil definitif Musrenbang desa/kelurahan menjadi bahan dalam penyusunan program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan tahun berikutnya (T+1);
- g. program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan ditandatangani oleh Ketua Posluhdes serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan, selanjutnya program tersebut disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan.

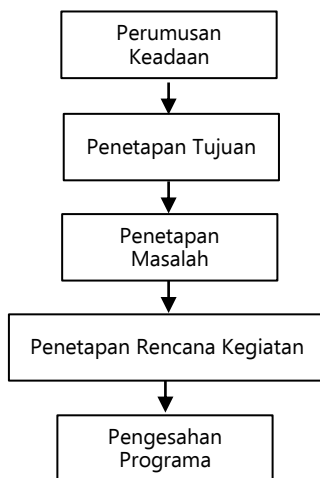
Alur proses penyusunan program desa dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini.



Gambar 9 Proses Penyusunan Program Desa/Kelurahan

### 3. Tahapan

Tahapan penyusunan program dilakukan sesuai dengan skema sebagai berikut:



Gambar 10 Tahapan penyusunan Program

## 1. Perumusan Keadaan

Keadaan dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada dasarnya Program Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Perumusan keadaan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang menggambarkan Potensi Usaha Tani, produktivitas dan produksi komoditas strategis nasional serta Komoditas Unggulan lainnya, serta dukungan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi tersebut, yang meliputi aspek sebagai berikut:

- a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya;
- b. Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
- c. Ketenagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan berkaitan dengan materi, metode, peran serta dan kerjasama;
- e. prasarana dan sarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian.
- f. kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya;

Selain itu rumusan keadaan juga mencakup informasi tentang dukungan Lingkungan Usaha Tani yang meliputi fasilitasi konstruksi dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES); sarana produksi

pertanian; alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran; serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani.

## 2) Kecamatan

Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan merupakan rencana penyuluhan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Perumusan keadaan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut:

- a. Produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan Komoditas Unggulan di kecamatan dibandingkan dengan sasaran yang akan dicapai;
- b. Keragaan tingkat penerapan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani (misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil);
- c. Keragaan kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian);
- d. Keragaan Lingkungan Usaha Tani berupa ketersediaan sub terminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di desa;
- e. Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, dan jalan usaha tani;
- f. Keragaan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (Pos Penyuluhan Desa/Posluhdes), ketenagaan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, prasarana dan sarana penyuluhan, serta pembiayaan penyuluhan;

- g. Keragaan pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI).

Rumusan keadaan di kecamatan diperoleh dari rekapitulasi hasil analisis Participatory Rural Appraisal (PRA) desa/kelurahan atau hasil rekapitulasi teknik identifikasi faktor penentu (impact point). Dalam hal wilayah kerja Balai Penyuluhan di Kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka keadaan dirumuskan untuk setiap kecamatan.

### 3) Desa/Kelurahan

Programa desa/kelurahan merupakan acuan bagi Penyuluh pertanian di desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dan pendamping Petani di wilayah kerjanya.

Perumusan keadaan di desa/kelurahan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, antara lain melalui metode PRA, teknik identifikasi faktor penentu (impact point) atau teknik lainnya untuk menjangkau kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani. Rumusan keadaan menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) sebagai berikut:

- a. Produktivitas dan produksi nyata di tingkat desa/kelurahan dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- b. Keragaan penerapan inovasi/teknologi baru (misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil menerapkan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani);
- c. Keragaan kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian);
- d. Keragaan kelas kemampuan kelompok tani termasuk Petani yang belum bergabung dalam kelompok;

- e. Keragaan Lingkungan Usaha Tani berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa;
- f. Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, jalan usaha tani.

## **2. Penetapan Tujuan**

Penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun berkaitan dengan Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani, sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dan upaya untuk menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan Komoditas Unggulan lainnya di wilayah masing-masing.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD, untuk tujuan:

### **1) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota**

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan yang akan dicapai dalam Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian guna mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya di daerah masing-masing, meliputi:

- a. Penguatan dan pendayagunaan kelembagaan penyuluhan;
- b. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Petani;
- c. Peningkatan kompetensi dan pemberdayagunaan ketenagaan penyuluhan;
- d. Pemenuhan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. Pembiayaan penyuluhan;
- f. Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan; dan
- g. Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif.

## 2) Kecamatan

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun berkaitan dengan hal sebagai berikut:

Perilaku Petani dalam penerapan inovasi/teknologi yang direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha tani;

- a. Peran dan fungsi kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian);
- b. Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif, antara lain berupa ketersediaan sub terminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di kecamatan;
- c. Kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES dan jalan usaha tani;
- d. Kegiatan untuk mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (Posluhdes), ketenagaan, pelaksanaan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI).

## 3) Desa/Kelurahan

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun berkaitan dengan hal sebagai berikut:

- a. Tingkat penerapan inovasi/teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- b. Peran dan fungsi kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian);

- c. Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani termasuk peningkatan jumlah Petani yang bergabung dalam kelompok;
- d. Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa;
- e. Kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, jalan usaha tani.

### **3. Penetapan Masalah**

Penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah, sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. apakah masalah itu menyangkut mayoritas para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- b. apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, Lingkungan Usaha Tani, Perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
- c. apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/ inovasi untuk pemecahan masalah.

Penjelasan mengenai penetapan masalah di masing-masing tingkat sebagai berikut:

#### **1) Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota**

Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut:

- a. Pemetaan dan penguatan kelembagaan penyuluhan khususnya peran Balai Penyuluhan di kecamatan sebagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Program dan Pelaksanaan Kegiatan serta Pusat Data dan Informasi Pembangunan Pertanian di kecamatan;
- b. Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- c. Peningkatan kompetensi ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- d. Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan pembiayaan serta optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- e. Perkembangan tingkat kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penerapan inovasi teknologi.

## 2) Kecamatan

Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya peran Balai Penyuluhan di kecamatan dalam pelaksanaan keterpaduan program dan kegiatan, optimalisasi potensi sumber daya, evaluasi pencapaian target dan identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- b. Faktor yang bersifat Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan masih rendahnya tingkat adopsi Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penerapan inovasi/teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani;
- c. Faktor penyebab masih rendahnya tingkat kemampuan Petani dalam mengakses informasi, permodalan dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani, mengembangkan jejaring usaha untuk meningkatkan skala ekonomi usaha;

d. Faktor yang bersifat Non Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit, pengairan atau permodalan usaha.

### 3) Desa/Kelurahan

Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan tani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) dan kelembagaan ekonomi Petani di desa/kelurahan;
  - Faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, antara lain sebagai berikut: pendampingan Petani dalam penyusunan RDK dan RDKK oleh Penyuluh pertanian;
  - fasilitasi Petani dalam mengakses informasi teknologi, pasar dan harga;
  - bimbingan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan Kalender Tanam (KATAM), pola tanam dan pola usaha tani;
  - penyampaian umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi untuk disalurkan kepada BPTP;
  - bimbingan mengakses permodalan, sarana produksi dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani dan mengembangkan jejaring kerja dan kerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi usaha;
  - fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
  - pelaksanaan Rembugtani Desa/kelurahan;
  - identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya.

- b. Faktor yang bersifat Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap penerapan suatu inovasi/ teknologi baru (misalnya belum yakin, belum mau atau belum terampil menerapkan inovasi/ teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani);
- c. Faktor yang bersifat Non Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit, pengairan atau permodalan usaha.

#### **4. Penetapan Rencana Kegiatan**

Penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Rencana kegiatan ini disajikan dalam matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Mengingat makna program Penyuluhan Pertanian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan hanya dibuat di kecamatan/desa.

Penetapan Rencana Kegiatan:

##### **a. Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota**

Penetapan rencana kegiatan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain, meliputi:

- Pemetaan dan penguatan kelembagaan khususnya peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan;

- Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- Peningkatan kompetensi ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan pembiayaan penyuluhan;
- Optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- Penguatan kemampuan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.

Matriks rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/kabupaten/kota terdiri atas keadaan, tujuan, masalah, sasaran dan kegiatan (materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksana, dan keterangan). Beberapa contoh sasaran pada rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/kabupaten/kota yaitu ;

- Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di Nasional/Provinsi dan Kabupaten Kota
- Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Swadaya dan Swasta
- Pembuat kebijakan penyuluhan
- Kepala biro perencanaan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Ketua/pengurus kelembagaan petani/ kelembagaan ekonomi petani

Matriks rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/kabupaten/kota(form 1) sebagai berikut :

MATRIKS RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN NASIONAL / PROVINSI / KABUPATEN / KOTA  
TAHUN .....

NASIONAL

No	Kendaraan	Tujuan	Masalah	Sasaran*)	Kegiatan							Keterangan		
					Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

b. Kecamatan

Penetapan rencana kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan untuk mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain, meliputi:

- Peningkatan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- Penyediaan informasi teknologi/inovasi dan materi Penyuluhan Pertanian;
- Penyediaan data base penyuluhan berbasis Poktan dan gapoktan, serta data base ketenagaan Penyuluh;
- Peningkatan kemampuan Penyuluh pertanian (PNS, Swadaya dan Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- Fasilitasi pengembangan kelembagaan Petani/ kelembagaan ekonomi Petani dan kemitraan.
- Selain itu disusun matriks mengupayakan kemudahan pelayanan dan pengaturan yang berisikan rencana kegiatan pemecahan masalah Non Perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif.

c. Desa/Kelurahan

Penetapan rencana kegiatan di tingkat desa/kelurahan dilakukan dengan menyusun rencana kerja Penyuluh pertanian di desa/kelurahan secara sistematis dengan

memperhatikan kebutuhan Pelaku Utama di desa/kelurahan, dan bersinergi dengan program penyuluhan kecamatan. Selain itu disusun matriks mengupayakan kemudahan pemecahan masalah Non Perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan penciptaan lingkungan kondusif untuk usaha tani.





d. Penjelasan dan Contoh Pengisian Matriks Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan/Desa

- Keadaan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai status pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum yang berkaitan dengan tingkat produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

Contoh :

**Tanaman Pangan**

Pelaku utama yang melakukan penanaman system jajar legowo pada tanaman padi saat ini sebanyak 30 dari 100 orang atau baru 30 %.

**Tanaman Perkebunan**

Pelaku utama i yang melakukan pemangkasan produksi tanaman kakao sesuai anjuran teknis saat ini sebanyak 20 dari 60 orang atau baru 33%

- Tujuan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai upaya yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan pertanian secara umum, khususnya yang berkaitan dengan perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

Contoh:

**Tanaman Pangan**

Pelaku utama yang melakukan system tanam jajar legowo mencapai 70 % pada akhir tahun 2021.

## **Tanaman Perkebunan**

Pelaku utama yang melakukan pemangkasan produksi tanaman kakao sesuai anjuran teknis mencapai 66 % diakhir tahun 2021

- **Masalah**

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku, yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

### **Contoh Masalah Perilaku:**

#### **Tanaman Pangan**

- Pengetahuan Pelaku utama tentang system tanam jajar legowo pada tanaman padi masih kurang
- Keyakinan pelaku utama tentang keunggulan system tanam jajar legowo masih kurang

#### **Tanaman Perkebunan**

- Pengetahuan Pelaku utama tentang pemangkasan produksi pada tanaman kakao masih kurang
- Keyakinan pelaku utama tentang keunggulan pemangkasan produksi pada tanaman kakao masih kurang.

### **Contoh Masalah Non Perilaku:**

- Saluran tersier rusak berat
- Tidak ada jalan usahatani

Masalah non perilaku tersebut dimasukkan kedalam matriks rencana kegiatan untuk mengupayakan kemudahan (form. 3)

- Sasaran

Kolom ini menjelaskan mengenai siapa yang direncanakan untuk mendapat manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, atau desa/kelurahan.

Jumlah sasaran adalah pelaku utama dan atau pelaku usaha yang akan dirubah perilakunya. Berdasarkan contoh diatas, maka jumlah sasaran:

**Tanaman Pangan**

70 Orang Pelaku utama (yang belum melakukan system tanam jajar legowo)

**Tanaman Perkebunan**

40 Orang Pelaku utama (yang belum melakukan pemangkasan produksi)

- Materi

Kolom ini berisi mengenai jenis informasi teknologi yang menjadi pesan bagi sasaran, baik dalam bentuk pedoman-pedoman, petunjuk teknis suatu komoditas tertentu dan lain-lain.

**Tanaman Pangan**

system tanam jajar legowo pada tanaman padi

**Tanaman Perkebunan**

pemangkasan produksi pada tanaman kakao

- Kegiatan/Metode

Kolom ini berisi kegiatan-kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan. Metode untuk memecahkan masalah pengetahuan tentu berbeda dengan metode untuk memecahkan masalah sikap maupun keterampilan.

Bedasarkan contoh diatas terdapat dua masalah pada setiap keadaan yaitu masalah pengetahuan dan masalah sikap.

Penetapan metode penyuluhan didasarkan pada masalah yang akan dipecahkan.

Contoh:

**Tanaman Pangan**

Masalah: Pengetahuan Petani tentang system tanam jajar legowo pada tanaman padi masih kurang

Metode: Ceramah , Demonstrasi Cara (demcar)

Masalah: Keyakinan petani tentang keunggulan system tanam jajar legowo masih kurang

Metode: Demonstrasi plot (Demplot), Farm Field Day (FFD)

- Volume

Kolom volume berisi mengenai jumlah dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan/metode penyuluhan, atau agar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran.

Penetapan volume kegiatan mempertimbangkan Jumlah serta waktu luang sasaran.

- Lokasi  
Kolom ini memuat mengenai lokasi kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan lain-lain).
- Waktu  
Kolom ini berisikan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan.
- Sumber Biaya  
Kolom sumber biaya diisi mengenai beberapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang ditetapkan, serta dari mana sumber biaya yang tersebut diperoleh.
- Penanggungjawab  
Kolom ini berisi mengenai siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dengan jelas diminta pertanggungjawaban.
- Pelaksana  
Kolom ini berisi mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut, apakah dilakukan oleh penyuluh, petani/kelompok tani dan/atau pelaku usaha.
- Keterangan  
Kolom ini berisi uraian mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan tentang pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

**CONTOH RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN, KELURAHAN/DESA**

No	Keadaan	Tujuan	Masa lah	Sasaran										KEGIATAN PENYULUHAN					Ket
				Pelaku utama		Petani dewasa	Pelaku usaha		Petugas		Metode	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penang-gung Jawab	Pelak sana		
				Wani ta tani	Taru tani		L	P	L	P								Materi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelaku utama yang melakukan penanaman system jajar legowo pada tanaman padi saat ini sebanyak 30 dari 100 orang atau baru 30 %.	Pelaku Utama yang melakukan system tanam jajar legowo pada tanaman padi saat ini sebanyak 30 dari 100 orang atau baru 30% pada akhir tahun 2021	Pengertaha n pelaku utama tentang system tanam jajar legowo masih kurang	20		50					System tanam jajar legowo pada tanama n padi	Ceramah Dengar	6 kali	Poktan	Januari	Swadaya (300.000)	Penyuluh	Poktan	
			Kurangnya Keyakinan pelaku utama tentang keunggulan system tanam jajar legowo	20		50					Aplikasi system tanam jajar legowo pada tanama n padi	Demplo t FFD	1 kali	Lahan Petani	Febru ar i-Mei	ADD (3 Jt.)	Penyuluh	Poktan	

e.

#### 4) Pengesahan Programa

Programa Penyuluhan Pertanian yang telah disusun kemudian disahkan oleh pimpinan unit kerja pada masing-masing tingkat pemerintahan. Programa definitif di setiap tingkat administrasi pemerintahan ini selesai paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musrenbang pada tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

### **E. REVISI PROGRAMAMA**

Revisi programa penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan apabila terjadi perubahan sasaran kegiatan dan anggaran dalam tahun berjalan.

Prosedur revisi programa Penyuluhan Pertanian nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan secara internal oleh kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan.

Programa Penyuluhan Pertanian yang telah direvisi disampaikan kepada:

#### 1. Programa Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Programa Penyuluhan Pertanian Nasional yang telah direvisi disampaikan kepada Kepala BPPSDMP melalui Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
- b. Programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi;
- c. Programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja

yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.

## 2. Programa Kecamatan/Desa/Kelurahan

- a. Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
- b. Programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan yang telah direvisi disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

## **F. FORMAT PELAPORAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

### **1. Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan diuraikan informasi yang melatarbelakangi perlunya penyusunan program penyuluhan disuatu tingkatan wilayah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan).

### **2. Keadaan Umum**

Dalam bab ini digambarkan mengenai potensi sumber daya pembangunan pertanian secara umum dan sumber daya yang erat kaitannya dengan penyuluhan pertanian dan merupakan bagian dari program-program pembangunan pertanian di suatu tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan) yang perlu didukung dengan data informasi yang menunjang, baik kualitatif dan kuantitatif.

### **3. Tujuan**

Dalam bab ini digambarkan pernyataan mengenai perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku usaha, pelaku utama,

kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian serta pemangku kepentingan yang akan dicapai untuk mengubah potensi sumber daya pembangunan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan menjadi peluang yang nyata dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas, pendapat, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menggambarkan target yang secara realistis dapat dicapai dalam kurun waktu setahun.

#### **4. Masalah**

Dalam bab ini digambarkan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan. Uraian ini dimulai dengan analisa permasalahan yang bersifat non perilaku yang menghambat pencapaian tingkat produktivitas, baik yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, maupun pengaturan dan pelayanan. Selanjutnya analisa non perilaku ini diikuti dengan analisa perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan.

#### **5. Rencana Kegiatan Penyuluhan**

Bab ini menggambarkan berbagai kegiatan/metode penyuluhan yang dipandang tepat untuk mentransformasi terjadinya perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara lengkap rencana kegiatan penyuluhan ini dituangkan dalam bentuk matriks program penyuluhan yang mengisi mengenai keadaan, tujuan, masalah, sasaran (*target beneficiaries*), materi, kegiatan/metoda, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggungjawab.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat non perilaku, misalnya kegiatan-kegiatan untuk membantu/mengikhtiarkan kemudahan bagi pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, pengaturan dan pelayanan, dituangkan dalam bentuk matriks (terlampir). Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan dalam *Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan* tahun yang berjalan di setiap tingkatan wilayah untuk mendapat dukungan dari dinas/instansi lingkup pertanian dan dinas/instansi terkait.

# **BAB III**

## **RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN**

### **A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH (RKTP)**

*Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)* adalah suatu rencana tertulis yang dibuat oleh Penyuluh Pertanian untuk suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk kegiatan penyuluhan pertanian. *RKTP* ini merupakan *jadwal* yang disusun oleh para penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluhan setempat yang menentukan hal-hal yang harus disiapkan dalam berinteraksi dengan petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha.

*RKTP* merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Penyuluh Pertanian yang harus dibuat seorang Penyuluh dua kali dalam setahun atau paling kurang sekali setahun. *RKTP* ini juga dapat membuat kegiatan dalam program penyuluhan BPP dan program penyuluhan kabupaten/kota, apabila ada kegiatan dari kedua program tersebut yang dialokasikan sesuai *RKTP* yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikatan dan Kehutanan (SP3K)* maka *RKTP* diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam *RKTP* adalah kegiatan yang mampu merespon kebutuhan

pelaku utama dan pelaku usaha serta memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansi terkait.

Dengan menyusun *RKTP* maka diharapkan masalah-masalah yang selama ini dirasakan menghambat dalam hal persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dapat diatasi, sehingga *RKTP* disusun sebagai acuan bagi para Penyuluh dalam hal menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.

Tujuan penyusunan *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada tahun sedang berjalan atau tahun yang bersangkutan.
- 2) Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Penyuluh Pertanian yang bersangkutan.
- 3) Indikator keberhasilan seorang Penyuluh Pertanian dilihat dari 9 (sembilan) tolok ukur keberhasilan berikut:
  - d. Tersusunnya program penyuluhan pertanian;
  - e. Tersusunnya *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)*;
  - f. Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi;
  - g. Terdesiminasinya teknologi pertanian secara merata;
  - h. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha;
  - i. Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan;
  - j. Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha kelembagaan keuangan, informasi dan sarana produksi.;
  - k. Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya.;
  - l. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama.

- 4) Langkah-langkah penyusunan *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)*:
- a. Dengan dipimpin oleh Koordinator Penyuluh setempat, lakukan musyawarah diantara seluruh Penyuluh di setiap tingkatan untuk membagi habis kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian kepada masing-masing penyuluh. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian/ keterampilan Penyuluh Pertanian yang ada, penugasan yang diberikan, ketersediaan waktu dan kebutuhan petani/kelompok tani.
  - b. Masing-masing penyuluh menyusun *Rencana Kerja Tahunan (RKT)* Penyuluh Pertanian yang menjadi tugasnya dan menjabarkannya lebih rinci ke dalam Rencana Kegiatan Bulanan dan Harian.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh pertanian terbagi atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh pertanian Nasional/Provinsi/Kabupaten **(form.1)** dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh pertanian Kecamatan/Kelurahan/Desa. **(form2)**





## **B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH (RKTP)**

Penetapan tujuan *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)* adalah perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam waktu satu tahun. Tujuan dirumuskan dengan kalimat yang menggambarkan perubahan perilaku dari pelaku utama dan pelaku usaha yang ingin dan hendak dicapai. Penetapan tujuan tersebut mencakup keinginan dan kepentingan dari dua belah pihak.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP)* yaitu:

### 1) Masalah

Masalah adalah faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan *RKTPP*, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku.

### 2) Sasaran

Sasaran dalam *RKTPP* adalah pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/kelurahan. Penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tingkat rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya.

### 3) Kegiatan

a. Kegiatan penyuluhan meliputi: materi, metode, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, penanggungjawab dan pelaksana.

b. Materi dalam *RKTPP* meliputi informasi teknologi pertanian yang menjadi pesan bagi sasaran dalam bentuk pedoman petunjuk teknis suatu komoditas tertentu.

- c. Metode dalam *RKTPP* berupa kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan.
- d. Volume dalam *RKTPP* adalah jumlah dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan/metode penyuluhan agar terjadi perubahan perilaku pada sasaran dasar terampil bertempat di desa/kelurahan.
- e. Waktu dalam *RKTPP* adalah waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam *RKTPP*.
- f. Sumber biaya dalam *RKTPP* menjelaskan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan serta sumbernya.
- g. Penanggung jawab dalam *RKTPP* menjelaskan siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan jika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat dengan jelas diminta pertanggungjawabannya.
- h. Pelaksanaan dalam *RKTPP* menjelaskan siapa yang melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut, apakah dilakukan oleh penyuluh di desa/kelurahan itu, petani, kelompok tani dan/atau pelaku usaha.
- i. Keterangan dalam *RKTPP* menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan tentang pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

## **C. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH (RKTP)**

### **1. Unsur-unsur dalam *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP)***

*Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP)* merupakan rencana kegiatan penyuluh dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

*Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP)* juga merupakan pernyataan tertulis dari serangkaian kegiatan yang terukur, realitas, bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh pertanian di wilayah kerjanya masing-masing pada tahun yang berjalan. *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian* tersebut dituangkan dalam bentuk matriks seperti terdapat pada tabel format 1 dan format 2.

Secara garis besar *Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP)* terdiri dari:

- a. Jadwal kegiatan (waktu pelaksanaan, lokasi dan volume kegiatan).
- b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tugas pokok dan bidang kegiatan penyuluhan serta program penyuluhan setempat.
- c. Indikator kinerja dari setiap kegiatan yang digunakan sebagai standar penilaian keberhasilan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta penggunaan anggarannya.
- d. Hal lain atau bahan yang perlu dipersiapkan dalam rangka memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha.

## **2. Pembiayaan**

- a. Pembiayaan penyusunan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/kota berasal dari APBD kabupaten/kota.
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **3. Contoh rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian**

Contoh RKTTP tingkat kecamatan/kelurahan/desa disajikan pada tabel berikut:

**CONTOH RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN, KELURAHAN/DESA**

Nama Penyuluh : X  
Wilayah Kerja : Y

No	Tujuan	Masa lah	Sasaran						KEGIATAN PENYULUHAN						Ket				
			Pelaku utama			Pelaku usaha			Materi	Merode	Vol	Lokasi	Waktu	Biaya		Sumber Biaya	Penang- gung Jawab	Pelak sana	
			Wani ta tani	Tanu na tani	Petani dewasa	L	P	L											P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelaku Utama yang melakukan system tanam jajar legowo masih kurang pada tanaman padi mencapai 70% pada iakhir tahun 2021	Penggetahuan petani tentang system tanam jajar legowo masih kurang	20		50					System tanam jajar legowo pada tanama n padi	Ceramah Demcar	6 kali	Poktan	Januari	300.000	Swadaya	Penyuluh	Poktan	
		Kurangnya Keyakinan petani tentang keunggulan system tanam jajar legowo	20		50					Aplikasi system tanam jajar legowo pada tanama n padi	Demplo t FFD	1 kali	Lahan Petani	Februari-Mei	3.000.000	ADD	Penyuluh	Poktan	

Disahkan oleh

Pimpinan Unit Kerja

**CONTOH JADWAL RENCAKA KERJA BULANAN PENYULUH PERTANIAN**

Nama Penyuluh : X  
 Wilayah Kerja : Y

No	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.</b>	<b>Melaksanakan Penyuluhan System tanam Jarwo padi sawah</b>													
	a. Penyiapan Bahan penyuluhan (LPM, Sinopsis, Media)													
	b. Melaksanan penyuluhan													
<b>2.</b>	<b>Demplot Aplikasi System tanama jarwo padi sawah</b>													
	a. Pendampingan Penyiapan benih													
	b. Pendampingan Pengolahan Tanah													
	c. Pendampingan Pemupukan dasar													
	d. Pendampingan Penanaman													
	e. Pendampingan Pengendalian OPT													
	f. Pendampingan Pemupukan susulan I													
	g. Pendampingan Penyiangian													
	h. Pemupukan susulan II													
<b>3.</b>	<b>Melaksanakan FFD</b>													
	Persipan FFD													
	Pelaksanaan FFD													

**CONTOH JADWAL RENCANA KERJA HARIAN PENYULUH PERTANIAN**

Nama Penyuluh : X  
 Wilayah Kerja : Y

NO	KEGIATAN	BULAN JANUARI																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
A.	<b>Penyuluhan system tanam jarwo padi sawah</b>																															
1.	Menyiapkan Bahan penyusunan Materi																															
2.	Membuat LPM dan Sinopsis																															
3.	Membuat Media penyuluhan dalam bentuk leaflet																															
4.	Membuat Media Penyuluhan daam bentuk Powerpoint																															
5.	Menyiapkan bahan Demcar																															
6.	Melaksanakan Penyuluhan di poktan A																															
7.	Melaksanakan Penyuluhan di poktan B																															
8.	Melaksanakan Penyuluhan di poktan C																															

# DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Departemen Pertanian.

Anonim, 2016. *Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: NOMOR 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tanggal : 29 September 20162009*

A.W Van den Ban dan Hawkins 2003. *Penyuluhan Pertanian, cetakan ke 6*. Kanisius. Yogyakarta

Bunting, A. H. 1986. *Extension and technical change in agriculture. In Investing in rural extension: strategies and goals*. London and New York, Elsevier : UK, 1986. pp. 37–51.

John D. Ingalls, Joseph M. Arceri, 1972, A Trainers Guide to Andragogy. U.S. Government Printing Office

Knowles, M. S. 1970. *The modern practice of adult education: Androgogy versus pedagogy*. New York: New York Association Press.

Leagans, Paul J. 1971. *Extension Education and Moderni- zation. In Leagans, Paul J. and Charles P. L~omis (editors) Behavioral Change in Agriculture*. Cornel University Press. Ithaca and London.

Lunandi, A, G. 1987. *Pendidikan orang dewasa*. Jakarta: Gramedia.

Mardikanto dan Soebiato 2017 *,Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta

Mardikanto, Totok dan Sri Sutarni, 1982, *Pengantar Penyuluhan Pertanian*, Hapsara, Surakarta.

- Mardikanto. T, 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mardikanto T. 1985. *Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Margono Slamet, 1989. "*Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian*". Institut Pertanian Bogor.
- Rhoades, R. E., & Booth, R. H. 1982. *Farmer-Backto-Farmer: A Model for Generating Acceptable Agricultural Technology*. Agricultural Administration
- Roger M & Shoemaker F. Floyd. 1971. *Communication of Innovation*. New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Rogers EM. dan Shoemekers F. *Comunication of Inovation*, Terjemahan oleh Hanafi A., 1987. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Usana Offset Printing. Surabaya.
- R. Soejitno.,1968 , *Petundjuk Penjuluhan Pertanian*, Soeroengan
- Schramm, Wilbur, 1973, *Men, messages, and media: a look at human communication*, New York : Harper & Row, Publishers
- Soekandar W, 1973. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*. CV. Yasaguna. Jakarta
- Suraiatna. Sumardi ,1988, *Metode Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: PT. Melton Putra
- Van den Ban AW, Hawkins HS. 1985. *Agricultural Extension*. New York: Longman Scientific and Technical
- Zakaria, 2006. *Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*. Pusat Manajemen Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian. Ciawi. Bogor

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Sabir, S.Pt., M.Si.**

Lahir di Sidrap 14 Mei 1964. Putra dari La Tato dan Hj.I Sahe. Pada tahun 1995 menyelesaikan pendidikan Diploma 3 jurusan Penyuluhan Pertanian Bidang Peternakan di APP Malang. Tahun 2002 menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak di Universitas Muhammadiyah Parepare. Tahun 2008 menyelesaikan pendidikan Strata 2 Program Studi Agribisnis di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare dan tahun 2019 menyelesaikan pendidikan Strata 3 di Universitas Brawijaya Malang program studi Ilmu Pertanian Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian.

Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan tahun 1984-2002, Tenaga Pengajar di SPP Polmas 1986-1990. Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak 2002-2005 pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap. Tahun 2005-2009 menjadi Penyuluh Pertanian pada kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kabupaten Sidrap, Fungsional widyaiswara 2009-2013 di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Jawa Timur, Asesor Kompetensi Bidang Penyuluhan Pertanian sejak tahun 2015. Kepala Balai Pelatihan Pertanian di Jambi tahun 2018-2019 dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Selain pendidikan formal, penulis juga telah mengikuti beberapa pendidikan dan latihan antara lain: Diklat Orientasi Penyuluh Pertanian, Diklat Dasar Penyuluh Pertanian, Diklat Penjurangan Penyuluh Pertanian, TOT Sertifikasi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Media Pembelajaran, *Training Officer Course, Management of Training*, Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III.

Penghargaan yang telah diterima penulis antara lain: Penyuluh Pertanian Terbaik Tingkat Kabupaten Polmas (1990), Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Berprestasi Tingkat Nasional (1993), Satya Lencana 10 Tahun, Satya Lencana 20 tahun.



**M. Issac Maulana, S.T., M.Si.**

Widyaiswara Ahli Madya, Pembina Tk.I/IV-b. Lahir di Makassar tanggal 20 April 1972. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1998 dan Tahun 2009 menyelesaikan studi S2 Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis di Universitas Hasanuddin Makassar.

Tahun 1998-2002 bekerja sebagai *Manager Fish and Crab Project* pada PT. Byrd Internasional, Perusahaan yang bergerak di bidang pengalangan kepiting rajungan di Makassar. Tahun 2002 - 2006 sebagai Staf Teknis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, Tahun 2006 – Sekarang sebagai Widyaiswara Pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku dengan spesialisasi Penyuluhan Pertanian dan Sosial Ekonomi Pertanian. Pengalaman lainnya, sebagai trainer pada Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian, baik Pelatihan Fungsional Dasar Terampil dan Ahli serta Alih Kelompok.



### **Wulansari Apriani, S.Pd., M.Pd.**

Lahir di Kota Bandung pada Tahun 1977. Putri pertama dari pasangan Drs. Ruhijat Sutisna, MM (alm) dan T. Tuti Susilawati, S.Pd ini mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (S1) Jurusan Pendidikan Teknik Elektro dan Universitas Negeri Makassar (S2) Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Selain sebagai Aparatur Sipil Negara di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa, Narasumber berbagai Seminar Parenting dan Keluarga, anggota Komunitas Ibu-Ibu Doyan Nulis (IIDN), Founder Komunitas Menulis Asyik (Musik), menulis telah menjadi hobinya. Baginya, menulis itu obat jiwa. Kegemarannya dalam menulis telah mengantarkannya menjadi Penulis dan Editor Non Fiksi tersertifikasi LSP-BNSP pada April 2020, Narasumber berbagai Pelatihan Menulis, Trainer di Sinergi Cendekia Indonesia dan Tanggul Literasi Indonesia, serta menjadi Editor tetap di Penerbit Dandelion Publisher.

Alumni Sekolah Perempuan Angkatan 15 ini telah melahirkan beberapa karya: *Aku dan 8 Bintang, Bangga Menjadi Ibu, Ramadhan Kareem, Selaksa Cinta Bakti Ananda, Me and My Mother in Law, Saat Berbagi Hati, Dear Ayah Bunda Suksesku Ada di Ridhamu, Hijrah, Emak Sandal Jepit, Ibu Adalah Cinta*, dan menjadi penulis pendamping pada Buku Ilmiah Populer *Ensiklopedia Pramuka* dan penulis ke 3 dari buku *Seri 1 Penyuluhan Pertanian*. Selain itu, ia telah menyunting beberapa buku: *Marginalisme Widyaiswara, Kreasi Olahan Mocaf, Akselerasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Ada Apa Dengan Pendidikan?, Lembutnya Sakaratul Maut, Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kota, Catatan Sang Pemimpi, Ayo Kembali ke Pertanian Organik, Rekam Jejak (Antologi Biografi), Selaksa Cinta Untuk Ananda, Workplace Bullying, Adaptasi Pelayanan Publik di Era New Normal Life, dan Penerapan Teaching Factory di Balai Pelatihan Pertanian (Tinjauan Filsafat*

*Ilmu dan Rekonstruksi Teori*). Penulis dapat ditemui di e-mail: [wulansari5200@gmail.com](mailto:wulansari5200@gmail.com) Fb: Wulansari Apriani, dan Ig: wulansariapriani5200



### **Jamaluddin Al Afgani, M.P.**

Lahir di Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Mei 1977. Anak ke-5 dari 8 bersaudara putra dari Bapak Sangkilang Daeng Boko dan Ibu Sopoya Daeng Sakking. Pendidikan SD-SMP di Kab. Takalar;

STMN Kendari (Lulus 1996), S1 di Universitas Negeri Yogyakarta (Lulus 2001), dan S2 di Universitas Gadjah Mada Jurusan Mekanisasi Pertanian, Program Studi Sistem Informasi Manajemen Pertanian (Lulus 2005). Sempat melanjutkan program S3 Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin tahun 2014.

Pengalaman kerja sebagai Staf Engineer PT. Pola Gondola Adiperkasa Jakarta Tahun 2001-2002; Dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2002-2007; dan PNS di Kementan RI sejak tahun 2008 – sekarang, sebagai Widyaiswara Bidang Pertanian Organik khususnya di Pembuatan Pupuk Organik. Saat ini juga merangkap sebagai Asesor Bidang Pertanian Organik di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.

Pengalaman Organisasi sebagai Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Kawasan Timur Indonesia tahun 2013-2017; Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Daerah Sulawesi Selatan tahun 2014-2017; Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Ikatan Widyaiswara Indonesia Cabang Kementerian Pertanian tahun 2017-2019; Wakil Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia Cabang Kementerian Pertanian tahun 2019 - 2020; Wakil Ketua IV Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia Periode tahun 2019-2020; dan Ketua III Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia. Buku yang sudah diterbitkan yaitu *Penerapan Teaching Factory di Balai Pelatihan Pertanian (Tinjauan Filsafat Ilmu dan Rekonstruksi Teori)* dan buku *Seri 1 Penyuluhan Pertanian*.